REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 446 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK RENCANA KERJA SUB NASIONAL ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE NET SINK* 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa telah ditetapkannya Rencana Operasional *Indonesia's Forestry and Other Land Use* (FOLU) *Net Sink* 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim di Indonesia;

b. bahwa dalam rangka implementasi Rencana Operasional *Indonesia's Forestry and Other Land Use* (FOLU) *Net Sink* 2030 maka 17 Provinsi telah Menetapkan Dokumen Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's Forestry and Other Land Use* (FOLU) *Net Sink* 2030 yang disahkan oleh Gubernur masing-masing provinsi, dan 11 (sebelas) provinsi masih dalam proses penyusunan;

c. bahwa salah satu hasil Rencana Kerja Sub Nasional *Indonesia's Forestry and Other Land Use* (FOLU) *Net Sink* 2030 sebagaimana dimaksud huruf b adalah Informasi Geospasial Tematik (IGT) Rencana Kerja Sub Nasional Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi *Indonesia's* FOLU *Net Sink* 2030;

d. bahwa IGT sebagaimana dimaksud huruf c menjadi acuan utama dalam penentuan lokasi Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi *Indonesia's* FOLU *Net Sink* 2030 di setiap provinsi;

e. bahwa berdasarkan tahapan kompilasi, integrasi, sinkronisasi dan kemudahan berbagi pakai IGT KLHK serta pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Informasi Geospasial Tematik Rencana Kerja Sub Nasional Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi *Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink* 2030;

Mengingat …

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Conventions on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);

6. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1387);
12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.168/ MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 Tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use* (FOLU) *Net Sink* 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK RENCANA KERJA SUB NASIONAL ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE NET SINK* 2030.

KESATU : Menetapkan Informasi Geospasial Tematik Rencana Kerja Sub Nasional Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi *Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink* 2030 dengan skala 1 : 250.000 sebagaimana tercantum pada peta Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

KEDUA : Informasi Geospasial Tematik Rencana Kerja Sub Nasional Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi *Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink* 2030 terdiri dari 28 (dua puluh delapan) provinsi, meliputi:

1. Provinsi Aceh;
2. Provinsi Bengkulu;
3. Provinsi Jambi;
4. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Provinsi Kepulauan Riau;
6. Provinsi Lampung;
7. Provinsi Riau;
8. Provinsi Sumatera Barat;
9. Provinsi Sumatera Selatan;
10. Provinsi Sumatera Utara.
11. Provinsi Kalimantan Barat;
12. Provinsi Kalimantan Selatan;
13. Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Provinsi Kalimantan Timur;
15. Provinsi Kalimantan Utara.
16. Provinsi Gorontalo;
17. Provinsi Sulawesi Barat;
18. Provinsi Sulawesi Selatan;
19. Provinsi Sulawesi Tengah;
20. Provinsi Sulawesi Tenggara;
21. Provinsi Sulawesi Utara.
22. Provinsi Bali;
23. Provinsi Nusa Tenggara Barat;
24. Provinsi Nusa Tenggara Timur.
25. Provinsi Maluku;
26. Provinsi Maluku Utara.
27. Provinsi Papua;
28. Provinsi Papua Barat.

Rincian luas rencana kerja setiap provinsi tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi *Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink* 2030 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi:

a. Pencegahan Deforestasi Mineral (RO1);
b. Pencegahan Deforestasi Gambut (RO2);
c. Pencegahan Degradasi Konsesi (RO3);
d. Pembangunan Hutan Tanaman (RO4);
e. Penerapan Pengayaan Hutan Alam (RO5);
f. Penerapan RIL-C (RO6);
g. Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi (RO7);
h. Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi (RO8);
i. Pengelolaan Tata Air Gambut (RO9);

j. Pelaksanaan ...

j. Pelaksanaan Restorasi Gambut (RO10);
k. Perlindungan Areal Konservasi Tinggi (RO11);
l. Pengelolaan Mangrove (RO12).

Rincian luas rencana kerja setiap Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi *Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink* 2030 tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan hasil pendetailan dari Rencana Operasional *Indonesia's Forestry and Other Land Use* (FOLU) *Net Sink* 2030 serta menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan/Lembaga/Perusahaan/Swasta dan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelaksanaan Aksi Mitigasi *Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink* 2030.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Program, Evaluasi,
Hukum dan Kerja Sama Teknik

TRIYONO SAPUTRO
NIP. 19660619 199103 1 001

a.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

ttd.

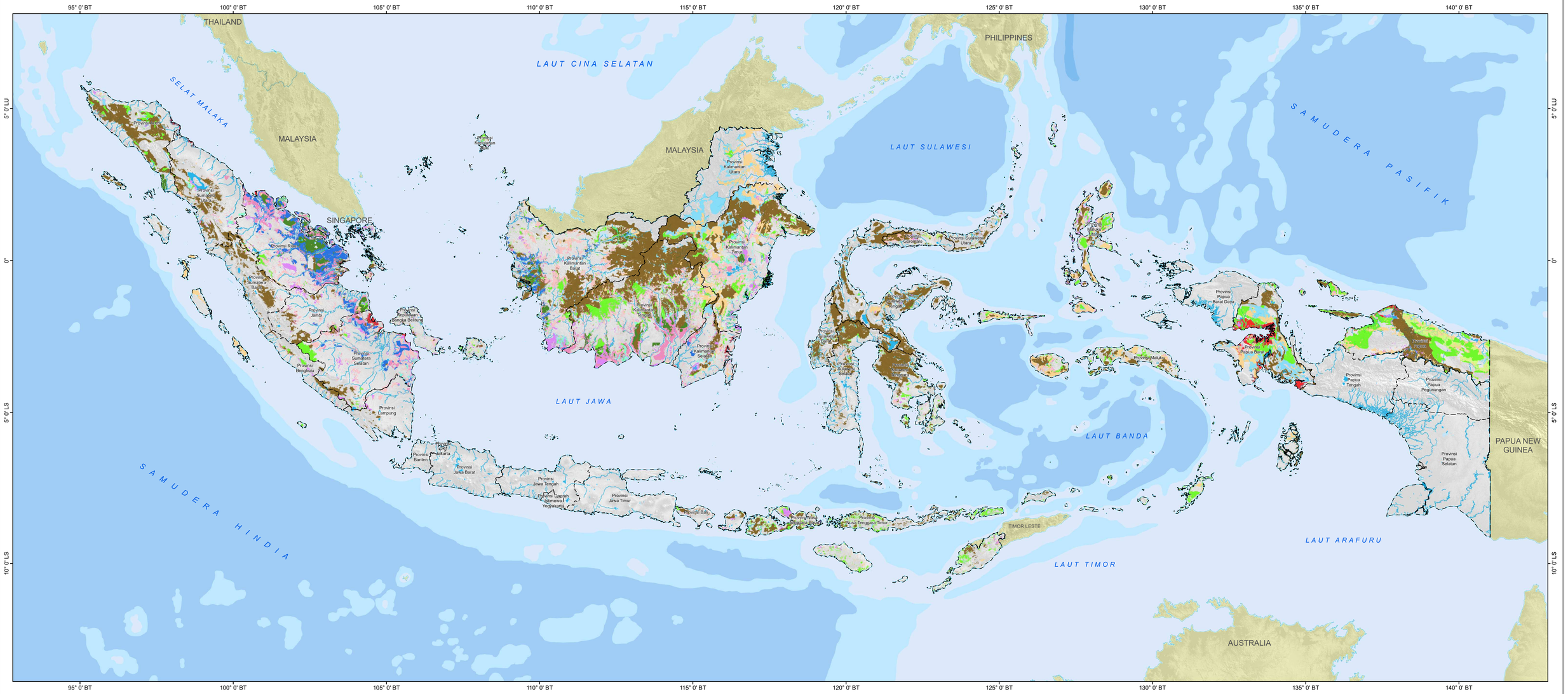
HANIF FAISOL NUROFIQ
NIP.19710321 199302 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Pertanian;
8. Menteri Dalam Negeri;
9. Menteri Energi dan Sumber daya Mineral;
10. Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove;
11. Kepala Badan Informasi Geospasial;
12. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Para Gubernur di Seluruh Indonesia;
14. Para Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia;
15. Ketua Harian I Tim Kerja FOLU Net Sink 2030;
16. Ketua Harian II Tim Kerja FOLU Net Sink 2030;
17. Sekretaris Tim Kerja FOLU Net Sink 2030;

18. Wakil ...

18. Wakil Sekretaris I Tim Kerja FOLU Net Sink 2030;
19. Wakil Sekretaris II Tim Kerja FOLU Net Sink 2030;
20. Ketua Bidang I Pengelolaan Hutan Lestari;
21. Ketua Bidang II Peningkatan Cadangan Karbon;
22. Ketua Bidang III Konservasi;
23. Ketua Bidang IV Pengelolaaan Ekosistem Gambut;
24. Ketua Bidang V Instrumen dan Informasi.

PETA RENCANA KERJA SUB NASIONAL ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE (FOLU) NET SINK* 2030



U

SKALA 1:5.000.000

0 125 250 500 750 1.000 Km

0 2.5 5 10 15 20 Cm

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Koordinat : Sistem Geografis
Datum : WGS 1984 / SRGI

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Garis Pantai

PERAIRAN
- Sungai
- Danau / Waduk

ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FOLU NET SINK* 2030

- RO1 (Pencegahan Deforestasi Mineral)
- RO2 (Pencegahan Deforestasi Gambut)
- RO3 (Pencegahan Degradasi Konsesi)
- RO4 (Pembangunan Hutan Tanaman)
- RO5 (Penerapan Pengayaan Hutan Alam)
- RO6 (Penerapan RIL-C)
- RO7 (Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi)
- RO8 (Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi)
- RO9 (Pengelolaan Tata Air Gambut)
- RO10 (Pelaksanaan Restorasi Gambut)
- RO11 (Perlindungan Areal Konservasi Tinggi)
- RO12 (Pengelolaan Mangrove)

Dasar:

1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional.
2. Keputusan MenteriLHK Nomor 168/MENLHK/PKTLPLA.1/2/2022 Tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink* 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Sumber:

1. Peta Indeks Jasa Lingkungan, Indeks Prioritas Lokasi, Indeks Kelembagaan Skala 1:250.000, KLHK 2022
2. Peta Penutupan Lahan Skala 1:250.000, KLHK 1990 & 2022
3. Peta Kawasan Hutan Skala 1:250.000, KLHK 2022
4. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Skala 1:250.000, KLHK 2022
5. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Skala 1:250.000, KLHK 2022
6. Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Skala 1:50.000, KLHK 2022
7. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial Revisi VII Skala 1:250.000, KLHK 2022
8. Peta Gambut Skala 1:250.000, KSP 2017
9. Peta Hak Guna Usaha Skala 1:250.000, KSP 2022
10. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000, BIG 2023
11. Peta Batas Administrasi Skala 1:50.000, KSP 2023

Catatan :

Jika terdapat perbedaan batas wilayah administrasi maka merujuk pada batas wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Lampiran I. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : 446 Tahun 2024
Tanggal : 23 Januari 2024

a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

PETA RENCANA KERJA SUB NASIONAL ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE (FOLU) NET SINK* 2030

PROVINSI ACEH

LUAS : ± 2.221.051 Ha

SKALA 1:600.000

0 15 30 60 90 120 Km

0 2.5 5 10 15 20 Cm

U

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Koordinat : Sistem Geografis
Datum : WGS 1984 / SRGI

Lampiran I. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : 446 Tahun 2024
Tanggal : 23 Januari 2024

a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI
- Ibukota Provinsi
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Garis Pantai

PERHUBUNGAN
- Jalan

PERAIRAN
- Sungai
- Danau / Waduk

ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FOLU NET SINK* 2030
- RO1 (Pencegahan Deforestasi Mineral)
- RO2 (Pencegahan Deforestasi Gambut)
- RO3 (Pencegahan Degradasi Konsesi)
- RO4 (Pembangunan Hutan Tanaman)
- RO5 (Penerapan Pengayaan Hutan Alam)
- RO6 (Penerapan RIL-C)
- RO7 (Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi)
- RO8 (Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi)
- RO9 (Pengelolaan Tata Air Gambut)
- RO10 (Pelaksanaan Restorasi Gambut)
- RO11 (Perlindungan Areal Konservasi Tinggi)
- RO12 (Pengelolaan Mangrove)

Dasar:

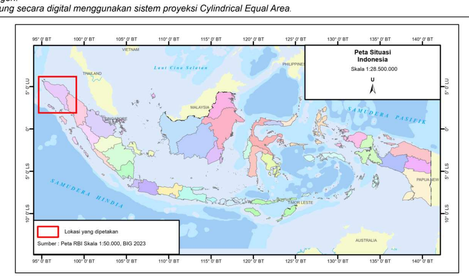
1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional.
2. Keputusan MenteriLHK Nomor 168/MENLHK/PKTLPLA.1/2/2022 Tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink* 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Sumber:

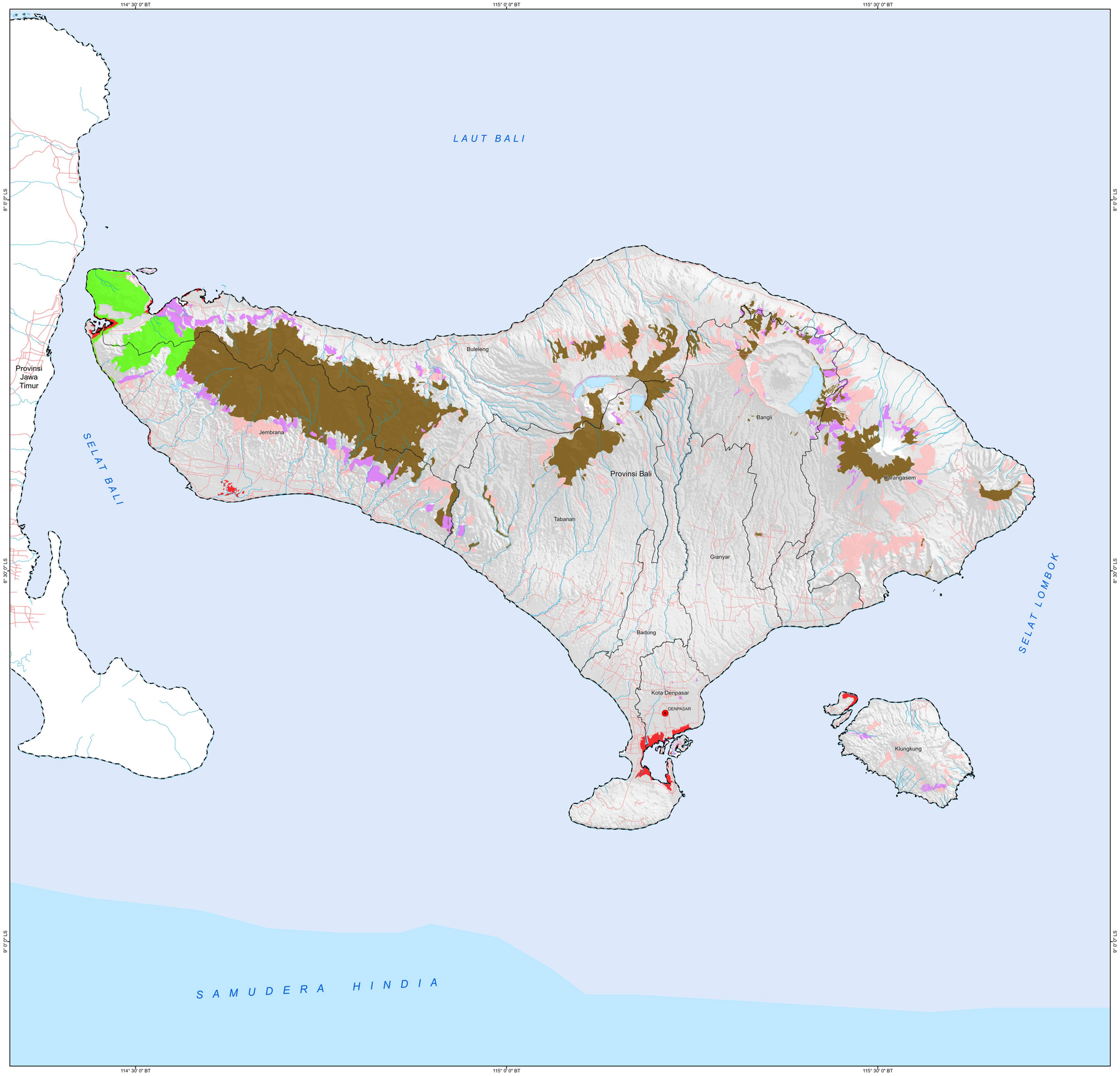
1. Peta Indeks Jasa Lingkungan, Indeks Prioritas Lokasi, Indeks Kelembagaan Skala 1:250.000, KLHK 2022
2. Peta Penutupan Lahan Skala 1:250.000, KLHK 1990 & 2022
3. Peta Kawasan Hutan Skala 1:250.000, KLHK 2022
4. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Skala 1:250.000, KLHK 2022
5. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Skala 1:250.000, KLHK 2022
6. Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Skala 1:50.000, KLHK 2022
7. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial Revisi VII Skala 1:250.000, KLHK 2022
8. Peta Gambut Skala 1:250.000, KSP 2017
9. Peta Hak Guna Usaha Skala 1:250.000, KSP 2022
10. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000, BIG 2023
11. Peta Batas Administrasi Skala 1:50.000, KSP 2023

Catatan :

1. Jika terdapat perbedaan batas wilayah administrasi maka merujuk pada batas wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Luas dihitung secara digital menggunakan sistem proyeksi Cylindrical Equal Area.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024



PETA RENCANA KERJA SUB NASIONAL ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE (FOLU) NET SINK* 2030

PROVINSI BALI

LUAS : ± 114.529 Ha

SKALA 1:200.000

0 5 10 20 30 40 Km

0 2.5 5 10 15 20 Cm

U

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Koordinat : Sistem Geografis
Datum : WGS 1984 / SRGI

Lampiran I. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : 446 Tahun 2024
Tanggal : 23 Januari 2024

a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI
- Ibukota Provinsi
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Garis Pantai

PERHUBUNGAN
- Jalan

PERAIRAN
- Sungai
- Danau / Waduk

ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FOLU NET SINK* 2030
- RO1 (Pencegahan Deforestasi Mineral)
- RO2 (Pencegahan Deforestasi Gambut)
- RO3 (Pencegahan Degradasi Konsesi)
- RO4 (Pembangunan Hutan Tanaman)
- RO5 (Penerapan Pengayaan Hutan Alam)
- RO6 (Penerapan RIL-C)
- RO7 (Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi)
- RO8 (Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi)
- RO9 (Pengelolaan Tata Air Gambut)
- RO10 (Pelaksanaan Restorasi Gambut)
- RO11 (Perlindungan Areal Konservasi Tinggi)
- RO12 (Pengelolaan Mangrove)

Dasar:

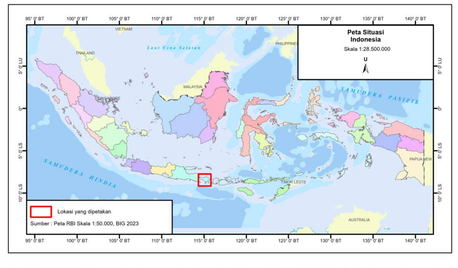
1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional.
2. Keputusan MenteriLHK Nomor 168/MENLHK/PKTLPLA.1/2/2022 Tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink* 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Sumber:

1. Peta Indeks Jasa Lingkungan, Indeks Prioritas Lokasi, Indeks Kelembagaan Skala 1:250.000, KLHK 2022
2. Peta Penutupan Lahan Skala 1:250.000, KLHK 1990 & 2022
3. Peta Kawasan Hutan Skala 1:250.000, KLHK 2022
4. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Skala 1:250.000, KLHK 2022
5. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Skala 1:250.000, KLHK 2022
6. Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Skala 1:50.000, KLHK 2022
7. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial Revisi VII Skala 1:250.000, KLHK 2022
8. Peta Gambut Skala 1:250.000, KSP 2017
9. Peta Hak Guna Usaha Skala 1:250.000, KSP 2022
10. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000, BIG 2023
11. Peta Batas Administrasi Skala 1:50.000, KSP 2023

Catatan :

1. Jika terdapat perbedaan batas wilayah administrasi maka merujuk pada batas wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Luas dihitung secara digital menggunakan sistem proyeksi Cylindrical Equal Area.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

PETA RENCANA KERJA SUB NASIONAL ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE (FOLU) NET SINK* 2030

PROVINSI BENGKULU

LUAS : ± 364.167 Ha

SKALA 1:500.000

0 12.5 25 50 75 100 Km

0 2.5 5 10 15 20 Cm

U

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Koordinat : Sistem Geografis
Datum : WGS 1984 / SRGI

Lampiran I. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : 446 Tahun 2024
Tanggal : 23 Januari 2024

a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI
- Ibukota Provinsi
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Garis Pantai

PERHUBUNGAN
- Jalan

PERAIRAN
- Sungai
- Danau / Waduk

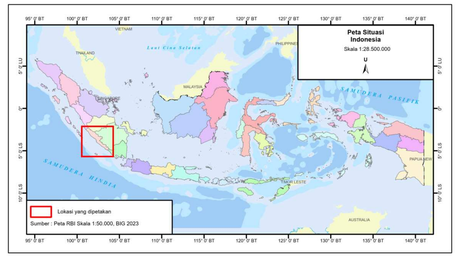
ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FOLU NET SINK* 2030
- RO1 (Pencegahan Deforestasi Mineral)
- RO2 (Pencegahan Deforestasi Gambut)
- RO3 (Pencegahan Degradasi Konsesi)
- RO4 (Pembangunan Hutan Tanaman)
- RO5 (Penerapan Pengayaan Hutan Alam)
- RO6 (Penerapan RIL-C)
- RO7 (Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi)
- RO8 (Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi)
- RO9 (Pengelolaan Tata Air Gambut)
- RO10 (Pelaksanaan Restorasi Gambut)
- RO11 (Perlindungan Areal Konservasi Tinggi)
- RO12 (Pengelolaan Mangrove)

Dasar:
1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional.
2. Keputusan MenteriLHK Nomor 168/MENLHK/PKTLPLA.1/2/2022 Tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink* 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

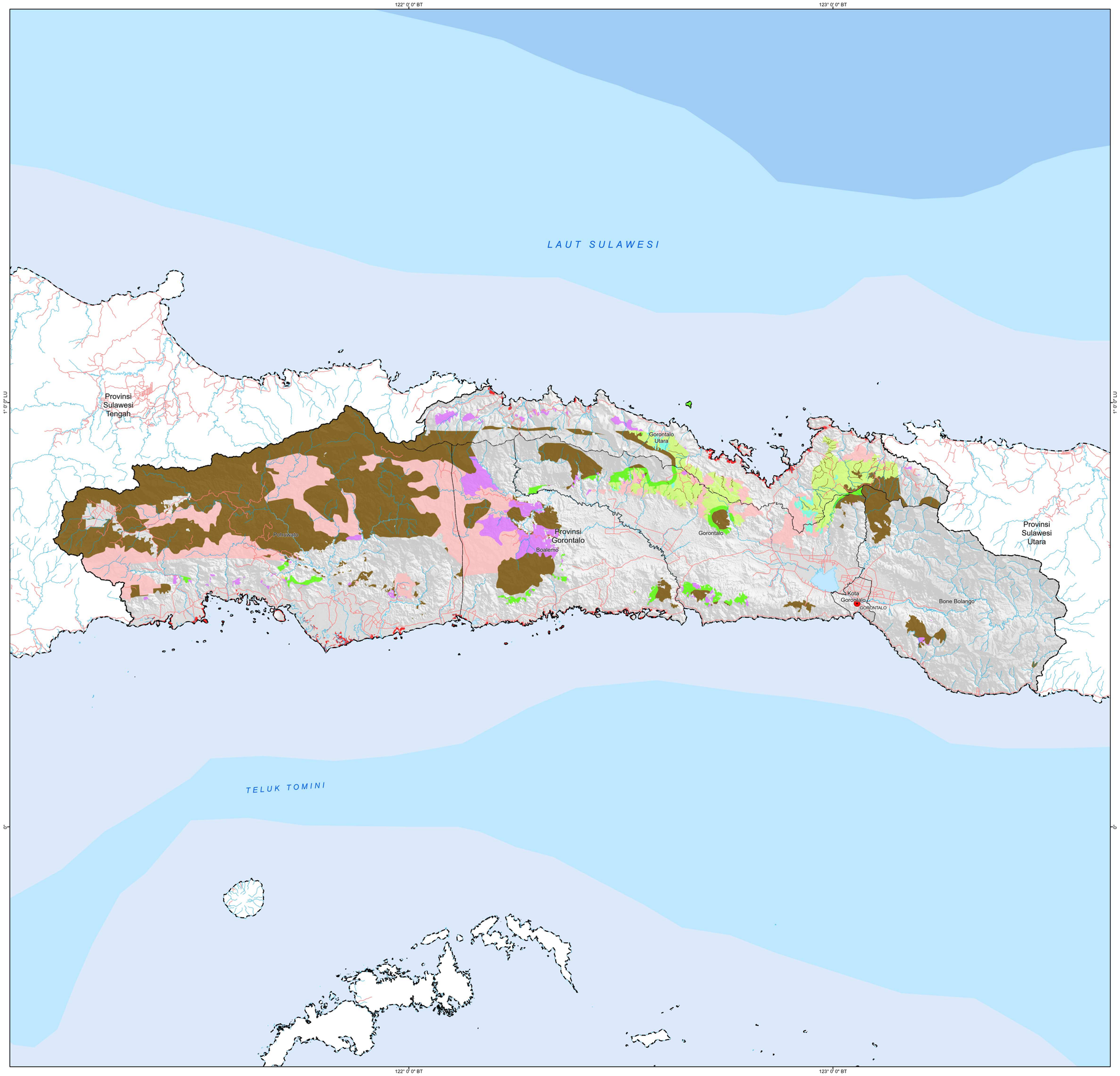
Sumber:
1. Peta Indeks Jasa Lingkungan, Indeks Prioritas Lokasi, Indeks Kelembagaan Skala 1:250.000, KLHK 2022
2. Peta Penutupan Lahan Skala 1:250.000, KLHK 1990 & 2022
3. Peta Kawasan Hutan Skala 1:250.000, KLHK 2022
4. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Skala 1:250.000, KLHK 2022
5. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Skala 1:250.000, KLHK 2022
6. Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Skala 1:50.000, KLHK 2022
7. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial Revisi VII Skala 1:250.000, KLHK 2022
8. Peta Gambut Skala 1:250.000, KSP 2017
9. Peta Hak Guna Usaha Skala 1:250.000, KSP 2022
10. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000, BIG 2023
11. Peta Batas Administrasi Skala 1:50.000, KSP 2023

Catatan :

1. Jika terdapat perbedaan batas wilayah administrasi maka merujuk pada batas wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Luas dihitung secara digital menggunakan sistem proyeksi Cylindrical Equal Area.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024



PETA RENCANA KERJA SUB NASIONAL ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE (FOLU) NET SINK* 2030

PROVINSI GORONTALO

LUAS : ± 472.940 Ha

SKALA 1:350.000

0 8.75 17.5 35 52.5 70 Km

0 2.5 5 10 15 20 Cm

U

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Koordinat : Sistem Geografis
Datum : WGS 1984 / SRGI

Lampiran I. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : 446 Tahun 2024
Tanggal : 23 Januari 2024

a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI
- Ibukota Provinsi
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Garis Pantai

PERHUBUNGAN
- Jalan

PERAIRAN
- Sungai
- Danau / Waduk

ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FOLU NET SINK* 2030
- RO1 (Pencegahan Deforestasi Mineral)
- RO2 (Pencegahan Deforestasi Gambut)
- RO3 (Pencegahan Degradasi Konsesi)
- RO4 (Pembangunan Hutan Tanaman)
- RO5 (Penerapan Pengayaan Hutan Alam)
- RO6 (Penerapan RIL-C)
- RO7 (Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi)
- RO8 (Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi)
- RO9 (Pengelolaan Tata Air Gambut)
- RO10 (Pelaksanaan Restorasi Gambut)
- RO11 (Perlindungan Areal Konservasi Tinggi)
- RO12 (Pengelolaan Mangrove)

Dasar:

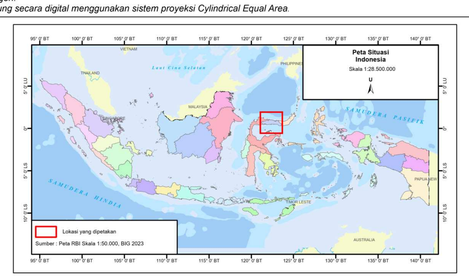
1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional.
2. Keputusan MenteriLHK Nomor 168/MENLHK/PKTLPLA.1/2/2022 Tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink* 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Sumber:

1. Peta Indeks Jasa Lingkungan, Indeks Prioritas Lokasi, Indeks Kelembagaan Skala 1:250.000, KLHK 2022
2. Peta Penutupan Lahan Skala 1:250.000, KLHK 1990 & 2022
3. Peta Kawasan Hutan Skala 1:250.000, KLHK 2022
4. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Skala 1:250.000, KLHK 2022
5. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Skala 1:250.000, KLHK 2022
6. Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Skala 1:50.000, KLHK 2022
7. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial Revisi VII Skala 1:250.000, KLHK 2022
8. Peta Gambut Skala 1:250.000, KSP 2017
9. Peta Hak Guna Usaha Skala 1:250.000, KSP 2022
10. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000, BIG 2023
11. Peta Batas Administrasi Skala 1:50.000, KSP 2023

Catatan :

1. Jika terdapat perbedaan batas wilayah administrasi maka merujuk pada batas wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Luas dihitung secara digital menggunakan sistem proyeksi Cylindrical Equal Area.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

PETA RENCANA KERJA SUB NASIONAL ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE (FOLU) NET SINK* 2030

PROVINSI JAMBI

LUAS : ± 1.093.828 Ha

SKALA 1:500.000

0 12.5 25 50 75 100 Km

0 2.5 5 10 15 20 Cm

U

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Koordinat : Sistem Geografis
Datum : WGS 1984 / SRGI

Lampiran I. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : 446 Tahun 2024
Tanggal : 23 Januari 2024

a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI
- Ibukota Provinsi
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Garis Pantai

PERHUBUNGAN
- Jalan

PERAIRAN
- Sungai
- Danau / Waduk

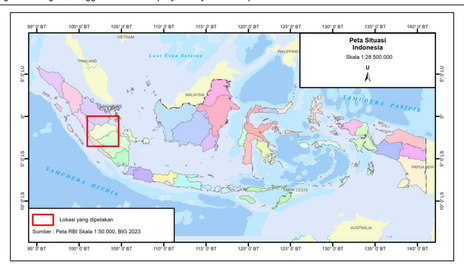
ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FOLU NET SINK* 2030
- RO1 (Pencegahan Deforestasi Mineral)
- RO2 (Pencegahan Deforestasi Gambut)
- RO3 (Pencegahan Degradasi Konsesi)
- RO4 (Pembangunan Hutan Tanaman)
- RO5 (Penerapan Pengayaan Hutan Alam)
- RO6 (Penerapan RIL-C)
- RO7 (Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi)
- RO8 (Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi)
- RO9 (Pengelolaan Tata Air Gambut)
- RO10 (Pelaksanaan Restorasi Gambut)
- RO11 (Perlindungan Areal Konservasi Tinggi)
- RO12 (Pengelolaan Mangrove)

Dasar:
1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional.
2. Keputusan MenteriLHK Nomor 168/MENLHK/PKTLPLA.1/2/2022 Tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink* 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Sumber:
1. Peta Indeks Jasa Lingkungan, Indeks Prioritas Lokasi, Indeks Kelembagaan Skala 1:250.000, KLHK 2022
2. Peta Penutupan Lahan Skala 1:250.000, KLHK 1990 & 2022
3. Peta Kawasan Hutan Skala 1:250.000, KLHK 2022
4. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Skala 1:250.000, KLHK 2022
5. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Skala 1:250.000, KLHK 2022
6. Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Skala 1:50.000, KLHK 2022
7. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial Revisi VII Skala 1:250.000, KLHK 2022
8. Peta Gambut Skala 1:250.000, KSP 2017
9. Peta Hak Guna Usaha Skala 1:250.000, KSP 2022
10. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000, BIG 2023
11. Peta Batas Administrasi Skala 1:50.000, KSP 2023

Catatan :

1. Jika terdapat perbedaan batas wilayah administrasi maka merujuk pada batas wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Luas dihitung secara digital menggunakan sistem proyeksi Cylindrical Equal Area.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

PETA RENCANA KERJA SUB NASIONAL ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE (FOLU) NET SINK* 2030

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LUAS : ± 7.653.423 Ha

SKALA 1:800.000

0 20 40 80 120 160 Km

0 2.5 5 10 15 20 Cm

U

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Koordinat : Sistem Geografis
Datum : WGS 1984 / SRGI

Lampiran I. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : 446 Tahun 2024
Tanggal : 23 Januari 2024

a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI
- Ibukota Provinsi
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Garis Pantai

PERHUBUNGAN
- Jalan

PERAIRAN
- Sungai
- Danau / Waduk

ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FOLU NET SINK* 2030

- RO1 (Pencegahan Deforestasi Mineral)
- RO2 (Pencegahan Deforestasi Gambut)
- RO3 (Pencegahan Degradasi Konsesi)
- RO4 (Pembangunan Hutan Tanaman)
- RO5 (Penerapan Pengayaan Hutan Alam)
- RO6 (Penerapan RIL-C)
- RO7 (Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi)
- RO8 (Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi)
- RO9 (Pengelolaan Tata Air Gambut)
- RO10 (Pelaksanaan Restorasi Gambut)
- RO11 (Perlindungan Areal Konservasi Tinggi)
- RO12 (Pengelolaan Mangrove)

Dasar:

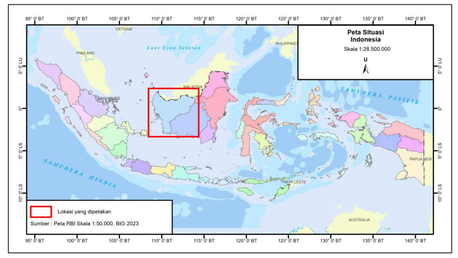
1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional.
2. Keputusan MenteriLHK Nomor 168/MENLHK/PKTLPLA.1/2/2022 Tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink* 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Sumber:

1. Peta Indeks Jasa Lingkungan, Indeks Prioritas Lokasi, Indeks Kelembagaan Skala 1:250.000, KLHK 2022
2. Peta Penutupan Lahan Skala 1:250.000, KLHK 1990 & 2022
3. Peta Kawasan Hutan Skala 1:250.000, KLHK 2022
4. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Skala 1:250.000, KLHK 2022
5. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Skala 1:250.000, KLHK 2022
6. Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Skala 1:50.000, KLHK 2022
7. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial Revisi VII Skala 1:250.000, KLHK 2022
8. Peta Gambut Skala 1:250.000, KSP 2017
9. Peta Hak Guna Usaha Skala 1:250.000, KSP 2022
10. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000, BIG 2023
11. Peta Batas Administrasi Skala 1:50.000, KSP 2023

Catatan :

1. Jika terdapat perbedaan batas wilayah administrasi maka merujuk pada batas wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Luas dihitung secara digital menggunakan sistem proyeksi Cylindrical Equal Area.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

PETA RENCANA KERJA SUB NASIONAL ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE (FOLU) NET SINK* 2030

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LUAS : ± 1.457.042 Ha

SKALA 1:450.000

0 11.25 22.5 45 67.5 90 Km

0 2.5 5 10 15 20 Cm

U

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Koordinat : Sistem Geografis
Datum : WGS 1984 / SRGI

Lampiran I. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : 446 Tahun 2024
Tanggal : 23 Januari 2024

a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI
- Ibukota Provinsi
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Garis Pantai

PERHUBUNGAN
- Jalan

PERAIRAN
- Sungai
- Danau / Waduk

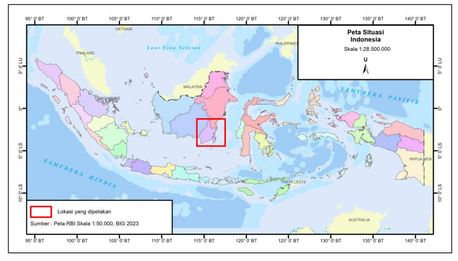
ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FOLU NET SINK* 2030
- RO1 (Pencegahan Deforestasi Mineral)
- RO2 (Pencegahan Deforestasi Gambut)
- RO3 (Pencegahan Degradasi Konsesi)
- RO4 (Pembangunan Hutan Tanaman)
- RO5 (Penerapan Pengayaan Hutan Alam)
- RO6 (Penerapan RIL-C)
- RO7 (Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi)
- RO8 (Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi)
- RO9 (Pengelolaan Tata Air Gambut)
- RO10 (Pelaksanaan Restorasi Gambut)
- RO11 (Perlindungan Areal Konservasi Tinggi)
- RO12 (Pengelolaan Mangrove)

Dasar:
1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional.
2. Keputusan MenteriLHK Nomor 168/MENLHK/PKTLPLA.1/2/2022 Tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink* 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Sumber:
1. Peta Indeks Jasa Lingkungan, Indeks Prioritas Lokasi, Indeks Kelembagaan Skala 1:250.000, KLHK 2022
2. Peta Penutupan Lahan Skala 1:250.000, KLHK 1990 & 2022
3. Peta Kawasan Hutan Skala 1:250.000, KLHK 2022
4. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Skala 1:250.000, KLHK 2022
5. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Skala 1:250.000, KLHK 2022
6. Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Skala 1:50.000, KLHK 2022
7. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial Revisi VII Skala 1:250.000, KLHK 2022
8. Peta Gambut Skala 1:250.000, KSP 2017
9. Peta Hak Guna Usaha Skala 1:250.000, KSP 2022
10. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000, BIG 2023
11. Peta Batas Administrasi Skala 1:50.000, KSP 2023

Catatan :

1. Jika terdapat perbedaan batas wilayah administrasi maka merujuk pada batas wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Luas dihitung secara digital menggunakan sistem proyeksi Cylindrical Equal Area



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

PETA RENCANA KERJA SUB NASIONAL ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE (FOLU) NET SINK* 2030

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

LUAS : ± 2.777.516 Ha

SKALA 1:500.000

0 12.5 25 50 75 100 Km

0 2.5 5 10 15 20 Cm

U

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Koordinat : Sistem Geografis
Datum : WGS 1984 / SRGI

Lampiran I. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : 446 Tahun 2024
Tanggal : 23 Januari 2024

a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI
- Ibukota Provinsi
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Garis Pantai

PERHUBUNGAN
- Jalan

PERAIRAN
- Sungai
- Danau / Waduk

ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FOLU NET SINK* 2030
- RO1 (Pencegahan Deforestasi Mineral)
- RO2 (Pencegahan Deforestasi Gambut)
- RO3 (Pencegahan Degradasi Konsesi)
- RO4 (Pembangunan Hutan Tanaman)
- RO5 (Penerapan Pengayaan Hutan Alam)
- RO6 (Penerapan RIL-C)
- RO7 (Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi)
- RO8 (Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi)
- RO9 (Pengelolaan Tata Air Gambut)
- RO10 (Pelaksanaan Restorasi Gambut)
- RO11 (Perlindungan Areal Konservasi Tinggi)
- RO12 (Pengelolaan Mangrove)

Dasar:

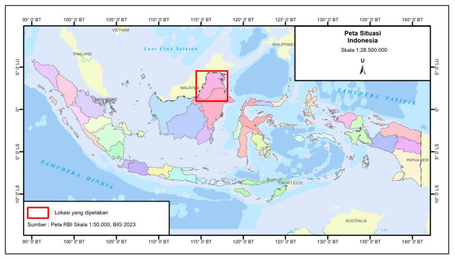
1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional.
2. Keputusan MenteriLHK Nomor 168/MENLHK/PKTLPLA.1/2/2022 Tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink* 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Sumber:

1. Peta Indeks Jasa Lingkungan, Indeks Prioritas Lokasi, Indeks Kelembagaan Skala 1:250.000, KLHK 2022
2. Peta Penutupan Lahan Skala 1:250.000, KLHK 1990 & 2022
3. Peta Kawasan Hutan Skala 1:250.000, KLHK 2022
4. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Skala 1:250.000, KLHK 2022
5. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Skala 1:250.000, KLHK 2022
6. Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Skala 1:50.000, KLHK 2022
7. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial Revisi VII Skala 1:250.000, KLHK 2022
8. Peta Gambut Skala 1:250.000, KSP 2017
9. Peta Hak Guna Usaha Skala 1:250.000, KSP 2022
10. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000, BIG 2023
11. Peta Batas Administrasi Skala 1:50.000, KSP 2023

Catatan :

1. Jika terdapat perbedaan batas wilayah administrasi maka merujuk pada batas wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Luas dihitung secara digital menggunakan sistem proyeksi Cylindrical Equal Area



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

PETA RENCANA KERJA SUB NASIONAL ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE (FOLU) NET SINK* 2030

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

LUAS : ± 12.483.536 Ha

SKALA 1:750.000

0 18.75 37.5 75 112.5 150 Km

0 2.5 5 10 15 20 Cm

U

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Koordinat : Sistem Geografis
Datum : WGS 1984 / SRGI

Lampiran I. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : 446 Tahun 2024
Tanggal : 23 Januari 2024

a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI
- Ibukota Provinsi
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Garis Pantai

PERHUBUNGAN
- Jalan

PERAIRAN
- Sungai
- Danau / Waduk

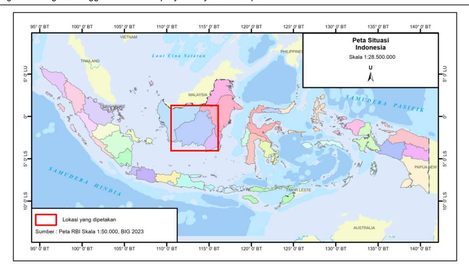
ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FOLU NET SINK* 2030
- RO1 (Pencegahan Deforestasi Mineral)
- RO2 (Pencegahan Deforestasi Gambut)
- RO3 (Pencegahan Degradasi Konsesi)
- RO4 (Pembangunan Hutan Tanaman)
- RO5 (Penerapan Pengayaan Hutan Alam)
- RO6 (Penerapan RIL-C)
- RO7 (Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi)
- RO8 (Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi)
- RO9 (Pengelolaan Tata Air Gambut)
- RO10 (Pelaksanaan Restorasi Gambut)
- RO11 (Perlindungan Areal Konservasi Tinggi)
- RO12 (Pengelolaan Mangrove)

Dasar:
1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional.
2. Keputusan MenteriLHK Nomor 168/MENLHK/PKTLPLA.1/2/2022 Tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink* 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Sumber:
1. Peta Indeks Jasa Lingkungan, Indeks Prioritas Lokasi, Indeks Kelembagaan Skala 1:250.000, KLHK 2022
2. Peta Penutupan Lahan Skala 1:250.000, KLHK 1990 & 2022
3. Peta Kawasan Hutan Skala 1:250.000, KLHK 2022
4. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Skala 1:250.000, KLHK 2022
5. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Skala 1:250.000, KLHK 2022
6. Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Skala 1:50.000, KLHK 2022
7. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial Revisi VII Skala 1:250.000, KLHK 2022
8. Peta Gambut Skala 1:250.000, KSP 2017
9. Peta Hak Guna Usaha Skala 1:250.000, KSP 2022
10. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000, BIG 2023
11. Peta Batas Administrasi Skala 1:50.000, KSP 2023

Catatan :

1. Jika terdapat perbedaan batas wilayah administrasi maka merujuk pada batas wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Luas dihitung secara digital menggunakan sistem proyeksi Cylindrical Equal Area



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

PETA RENCANA KERJA SUB NASIONAL ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE (FOLU) NET SINK* 2030

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LUAS : ± 11.495.942 Ha

SKALA 1:750.000

0 18.75 37.5 75 112.5 150 Km

0 2.5 5 10 15 20 Cm

U

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Koordinat : Sistem Geografis
Datum : WGS 1984 / SRGI

Lampiran I. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : 446 Tahun 2024
Tanggal : 23 Januari 2024

a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI
- Ibukota Provinsi
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Garis Pantai

PERHUBUNGAN
- Jalan

PERAIRAN
- Sungai
- Danau / Waduk

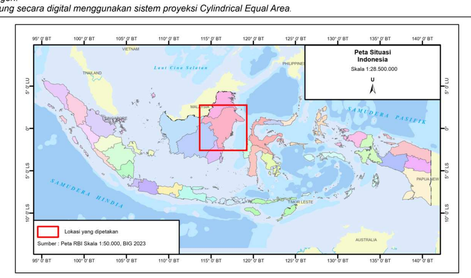
ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FOLU NET SINK* 2030
- RO1 (Pencegahan Deforestasi Mineral)
- RO2 (Pencegahan Deforestasi Gambut)
- RO3 (Pencegahan Degradasi Konsesi)
- RO4 (Pembangunan Hutan Tanaman)
- RO5 (Penerapan Pengayaan Hutan Alam)
- RO6 (Penerapan RIL-C)
- RO7 (Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi)
- RO8 (Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi)
- RO9 (Pengelolaan Tata Air Gambut)
- RO10 (Pelaksanaan Restorasi Gambut)
- RO11 (Perlindungan Areal Konservasi Tinggi)
- RO12 (Pengelolaan Mangrove)

Dasar:
1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional.
2. Keputusan MenteriLHK Nomor 168/MENLHK/PKTLPLA.1/2/2022 Tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink* 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Sumber:
1. Peta Indeks Jasa Lingkungan, Indeks Prioritas Lokasi, Indeks Kelembagaan Skala 1:250.000, KLHK 2022
2. Peta Penutupan Lahan Skala 1:250.000, KLHK 1990 & 2022
3. Peta Kawasan Hutan Skala 1:250.000, KLHK 2022
4. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Skala 1:250.000, KLHK 2022
5. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Skala 1:250.000, KLHK 2022
6. Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Skala 1:50.000, KLHK 2022
7. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial Revisi VII Skala 1:250.000, KLHK 2022
8. Peta Gambut Skala 1:250.000, KSP 2017
9. Peta Hak Guna Usaha Skala 1:250.000, KSP 2022
10. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000, BIG 2023
11. Peta Batas Administrasi Skala 1:50.000, KSP 2023

Catatan :

1. Jika terdapat perbedaan batas wilayah administrasi maka merujuk pada batas wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Luas dihitung secara digital menggunakan sistem proyeksi Cylindrical Equal Area



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

PETA RENCANA KERJA SUB NASIONAL ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE (FOLU) NET SINK* 2030

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

LUAS : ± 359.927 Ha

SKALA 1:550.000

0 13.75 27.5 55 82.5 110 Km

0 2.5 5 10 15 20 Cm

U

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Koordinat : Sistem Geografis
Datum : WGS 1984 / SRGI

Lampiran I. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : 446 Tahun 2024
Tanggal : 23 Januari 2024

a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI
- Ibukota Provinsi
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Garis Pantai

PERHUBUNGAN
- Jalan

PERAIRAN
- Sungai
- Danau / Waduk

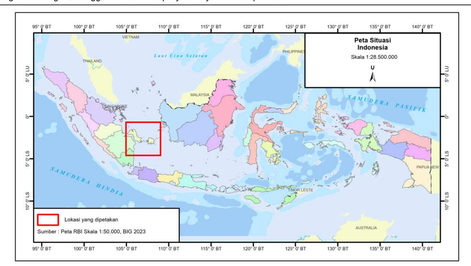
ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FOLU NET SINK* 2030
- RO1 (Pencegahan Deforestasi Mineral)
- RO2 (Pencegahan Deforestasi Gambut)
- RO3 (Pencegahan Degradasi Konsesi)
- RO4 (Pembangunan Hutan Tanaman)
- RO5 (Penerapan Pengayaan Hutan Alam)
- RO6 (Penerapan RIL-C)
- RO7 (Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi)
- RO8 (Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi)
- RO9 (Pengelolaan Tata Air Gambut)
- RO10 (Pelaksanaan Restorasi Gambut)
- RO11 (Perlindungan Areal Konservasi Tinggi)
- RO12 (Pengelolaan Mangrove)

Dasar:
1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional.
2. Keputusan MenteriLHK Nomor 168/MENLHK/PKTLPLA.1/2/2022 Tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink* 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Sumber:
1. Peta Indeks Jasa Lingkungan, Indeks Prioritas Lokasi, Indeks Kelembagaan Skala 1:250.000, KLHK 2022
2. Peta Penutupan Lahan Skala 1:250.000, KLHK 1990 & 2022
3. Peta Kawasan Hutan Skala 1:250.000, KLHK 2022
4. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Skala 1:250.000, KLHK 2022
5. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Skala 1:250.000, KLHK 2022
6. Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Skala 1:50.000, KLHK 2022
7. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial Revisi VII Skala 1:250.000, KLHK 2022
8. Peta Gambut Skala 1:250.000, KSP 2017
9. Peta Hak Guna Usaha Skala 1:250.000, KSP 2022
10. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000, BIG 2023
11. Peta Batas Administrasi Skala 1:50.000, KSP 2023

Catatan :

1. Jika terdapat perbedaan batas wilayah administrasi maka merujuk pada batas wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Luas dihitung secara digital menggunakan sistem proyeksi Cylindrical Equal Area.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

PETA RENCANA KERJA SUB NASIONAL ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE (FOLU) NET SINK* 2030

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

LUAS : ± 317.087 Ha

SKALA 1:400.000

0 10 20 40 60 80 Km

0 2.5 5 10 15 20 Cm

U

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Koordinat : Sistem Geografis
Datum : WGS 1984 / SRGI

Lampiran I. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : 446 Tahun 2024
Tanggal : 23 Januari 2024

a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI
- Ibukota Provinsi
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Garis Pantai

PERHUBUNGAN
- Jalan

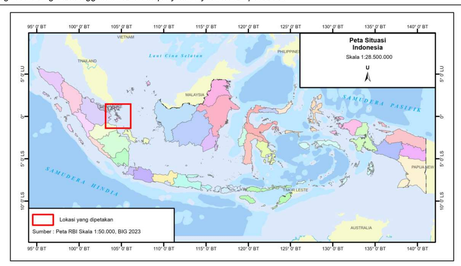
PERAIRAN
- Sungai
- Danau / Waduk

ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FOLU NET SINK* 2030
- RO1 (Pencegahan Deforestasi Mineral)
- RO2 (Pencegahan Deforestasi Gambut)
- RO3 (Pencegahan Degradasi Konsesi)
- RO4 (Pembangunan Hutan Tanaman)
- RO5 (Penerapan Pengayaan Hutan Alam)
- RO6 (Penerapan RIL-C)
- RO7 (Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi)
- RO8 (Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi)
- RO9 (Pengelolaan Tata Air Gambut)
- RO10 (Pelaksanaan Restorasi Gambut)
- RO11 (Perlindungan Areal Konservasi Tinggi)
- RO12 (Pengelolaan Mangrove)

Dasar:
1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional.
2. Keputusan MenteriLHK Nomor 168/MENLHK/PKTLPLA.1/2/2022 Tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink* 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Sumber:
1. Peta Indeks Jasa Lingkungan, Indeks Prioritas Lokasi, Indeks Kelembagaan Skala 1:250.000, KLHK 2022
2. Peta Penutupan Lahan Skala 1:250.000, KLHK 1990 & 2022
3. Peta Kawasan Hutan Skala 1:250.000, KLHK 2022
4. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Skala 1:250.000, KLHK 2022
5. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Skala 1:250.000, KLHK 2022
6. Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Skala 1:50.000, KLHK 2022
7. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial Revisi VII Skala 1:250.000, KLHK 2022
8. Peta Gambut Skala 1:250.000, KSP 2017
9. Peta Hak Guna Usaha Skala 1:250.000, KSP 2022
10. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000, BIG 2023
11. Peta Batas Administrasi Skala 1:50.000, KSP 2023

Catatan :
1. Jika terdapat perbedaan batas wilayah administrasi maka merujuk pada batas wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Luas dihitung secara digital menggunakan sistem proyeksi Cylindrical Equal Area.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

104° 0' 0" BT
105° 0' 0" BT
106° 0' 0" BT
4° 0' 0" LS
5° 0' 0" LS
6° 0' 0" LS

Provinsi Sumatera Selatan
Provinsi Bengkulu
Mesuji
Tulang Bawang Barat
Tulang Bawang
Way Kanan
Lampung Utara
Lampung Tengah
Provinsi Lampung
Lampung Barat
Kota Metro
Lampung Timur
Pesisir Barat
Tanggamus
Pringsewu
Kota Bandar Lampung
Pesawaran
Lampung Selatan
Provinsi Banten

LAUT JAWA
SAMUDERA HINDIA
SELAT SUNDA

PETA RENCANA KERJA SUB NASIONAL ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE (FOLU) NET SINK* 2030

PROVINSI LAMPUNG

LUAS : ± 194.169 Ha

SKALA 1:400.000

0 10 20 40 60 80 Km

0 2.5 5 10 15 20 Cm

U

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Koordinat : Sistem Geografis
Datum : WGS 1984 / SRGI

Lampiran I. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : 446 Tahun 2024
Tanggal : 23 Januari 2024

a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI
- Ibukota Provinsi
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Garis Pantai

PERHUBUNGAN
- Jalan

PERAIRAN
- Sungai
- Danau / Waduk

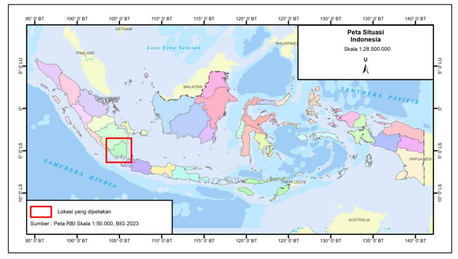
ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FOLU NET SINK* 2030
- RO1 (Pencegahan Deforestasi Mineral)
- RO2 (Pencegahan Deforestasi Gambut)
- RO3 (Pencegahan Degradasi Konsesi)
- RO4 (Pembangunan Hutan Tanaman)
- RO5 (Penerapan Pengayaan Hutan Alam)
- RO6 (Penerapan RIL-C)
- RO7 (Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi)
- RO8 (Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi)
- RO9 (Pengelolaan Tata Air Gambut)
- RO10 (Pelaksanaan Restorasi Gambut)
- RO11 (Perlindungan Areal Konservasi Tinggi)
- RO12 (Pengelolaan Mangrove)

Dasar:
1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional.
2. Keputusan MenteriLHK Nomor 168/MENLHK/PKTLPLA.1/2/2022 Tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink* 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Sumber:
1. Peta Indeks Jasa Lingkungan, Indeks Prioritas Lokasi, Indeks Kelembagaan Skala 1:250.000, KLHK 2022
2. Peta Penutupan Lahan Skala 1:250.000, KLHK 1990 & 2022
3. Peta Kawasan Hutan Skala 1:250.000, KLHK 2022
4. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Skala 1:250.000, KLHK 2022
5. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Skala 1:250.000, KLHK 2022
6. Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Skala 1:50.000, KLHK 2022
7. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial Revisi VII Skala 1:250.000, KLHK 2022
8. Peta Gambut Skala 1:250.000, KSP 2017
9. Peta Hak Guna Usaha Skala 1:250.000, KSP 2022
10. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000, BIG 2023
11. Peta Batas Administrasi Skala 1:50.000, KSP 2023

Catatan :

1. Jika terdapat perbedaan batas wilayah administrasi maka merujuk pada batas wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Luas dihitung secara digital menggunakan sistem proyeksi Cylindrical Equal Area.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

PETA RENCANA KERJA SUB NASIONAL ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE (FOLU) NET SINK* 2030

PROVINSI MALUKU UTARA

LUAS : ± 2.602.871 Ha

SKALA 1:800.000

0 20 40 80 120 160 Km

0 2.5 5 10 15 20 Cm

U

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Koordinat : Sistem Geografis
Datum : WGS 1984 / SRGI

Lampiran I. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : 446 Tahun 2024
Tanggal : 23 Januari 2024

a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI
- Ibukota Provinsi
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Garis Pantai

PERHUBUNGAN
- Jalan

PERAIRAN
- Sungai
- Danau / Waduk

ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FOLU NET SINK* 2030
- RO1 (Pencegahan Deforestasi Mineral)
- RO2 (Pencegahan Deforestasi Gambut)
- RO3 (Pencegahan Degradasi Konsesi)
- RO4 (Pembangunan Hutan Tanaman)
- RO5 (Penerapan Pengayaan Hutan Alam)
- RO6 (Penerapan RIL-C)
- RO7 (Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi)
- RO8 (Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi)
- RO9 (Pengelolaan Tata Air Gambut)
- RO10 (Pelaksanaan Restorasi Gambut)
- RO11 (Perlindungan Areal Konservasi Tinggi)
- RO12 (Pengelolaan Mangrove)

Dasar:

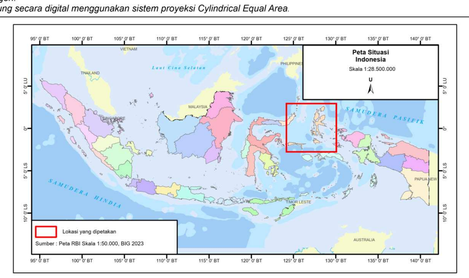
1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional.
2. Keputusan MenteriLHK Nomor 168/MENLHK/PKTLPLA.1/2/2022 Tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink* 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Sumber:

1. Peta Indeks Jasa Lingkungan, Indeks Prioritas Lokasi, Indeks Kelembagaan Skala 1:250.000, KLHK 2022
2. Peta Penutupan Lahan Skala 1:250.000, KLHK 1990 & 2022
3. Peta Kawasan Hutan Skala 1:250.000, KLHK 2022
4. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Skala 1:250.000, KLHK 2022
5. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Skala 1:250.000, KLHK 2022
6. Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Skala 1:50.000, KLHK 2022
7. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial Revisi VII Skala 1:250.000, KLHK 2022
8. Peta Gambut Skala 1:250.000, KSP 2017
9. Peta Hak Guna Usaha Skala 1:250.000, KSP 2022
10. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000, BIG 2023
11. Peta Batas Administrasi Skala 1:50.000, KSP 2023

Catatan :

1. Jika terdapat perbedaan batas wilayah administrasi maka merujuk pada batas wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Luas dihitung secara digital menggunakan sistem proyeksi Cylindrical Equal Area.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

PETA RENCANA KERJA SUB NASIONAL ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE (FOLU) NET SINK* 2030

PROVINSI MALUKU

LUAS : ± 2.385.275 Ha

SKALA 1:1.350.000

0 33.75 67.5 135 202.5 270 Km

0 2.5 5 10 15 20 Cm

U

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Koordinat : Sistem Geografis
Datum : WGS 1984 / SRGI

Lampiran I. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : 446 Tahun 2024
Tanggal : 23 Januari 2024

a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI
- Ibukota Provinsi
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Garis Pantai

PERHUBUNGAN
- Jalan

PERAIRAN
- Sungai
- Danau / Waduk

ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FOLU NET SINK* 2030

- RO1 (Pencegahan Deforestasi Mineral)
- RO2 (Pencegahan Deforestasi Gambut)
- RO3 (Pencegahan Degradasi Konsesi)
- RO4 (Pembangunan Hutan Tanaman)
- RO5 (Penerapan Pengayaan Hutan Alam)
- RO6 (Penerapan RIL-C)
- RO7 (Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi)
- RO8 (Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi)
- RO9 (Pengelolaan Tata Air Gambut)
- RO10 (Pelaksanaan Restorasi Gambut)
- RO11 (Perlindungan Areal Konservasi Tinggi)
- RO12 (Pengelolaan Mangrove)

Dasar:

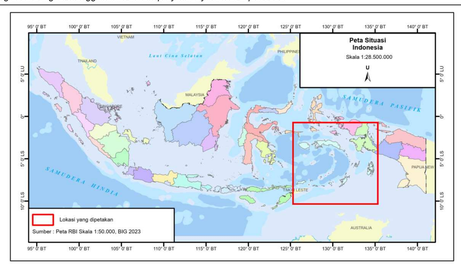
1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional.
2. Keputusan MenteriLHK Nomor 168/MENLHK/PKTLPLA.1/2/2022 Tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink* 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Sumber:

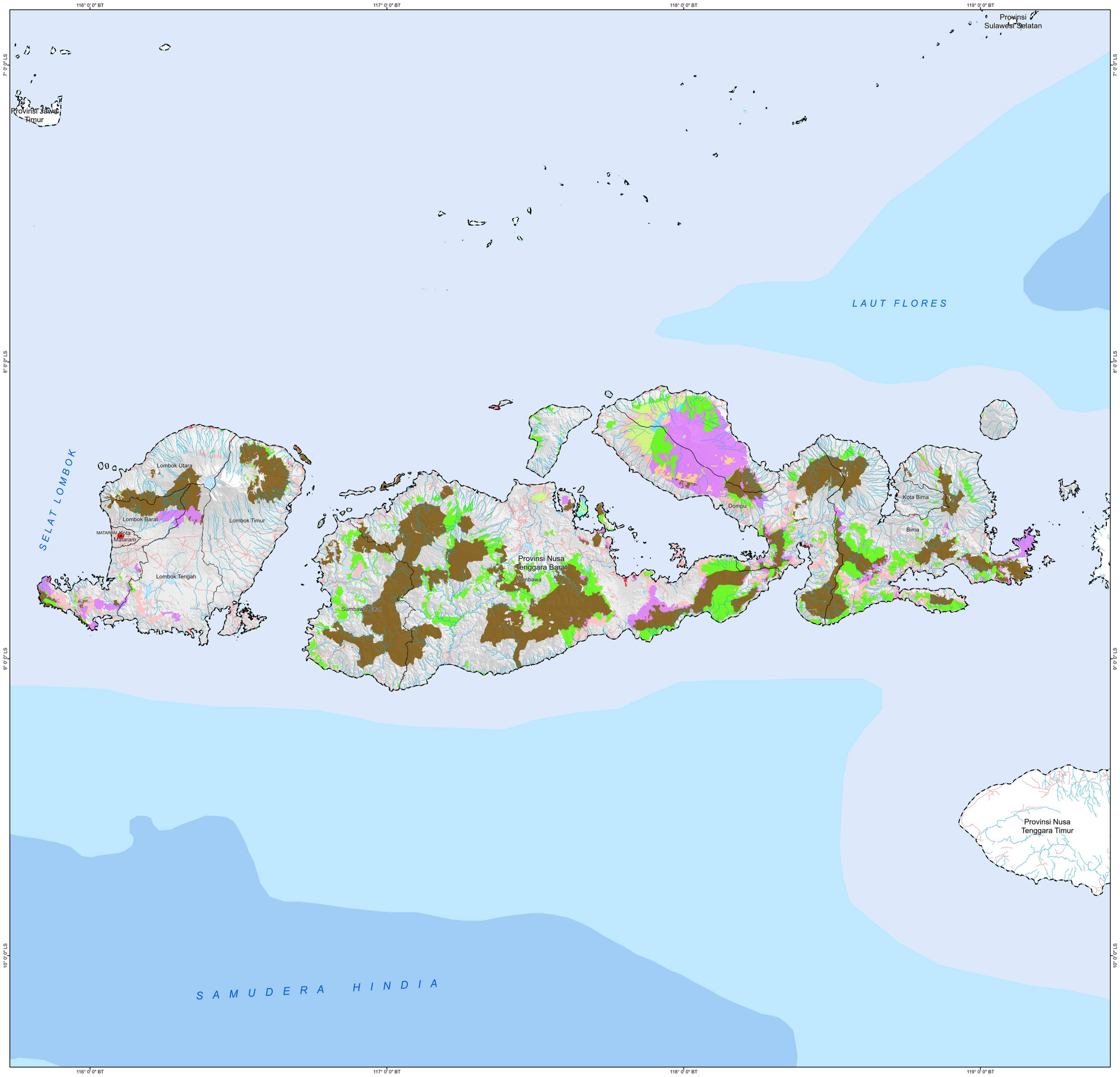
1. Peta Indeks Jasa Lingkungan, Indeks Prioritas Lokasi, Indeks Kelembagaan Skala 1:250.000, KLHK 2022
2. Peta Penutupan Lahan Skala 1:250.000, KLHK 1990 & 2022
3. Peta Kawasan Hutan Skala 1:250.000, KLHK 2022
4. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Skala 1:250.000, KLHK 2022
5. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Skala 1:250.000, KLHK 2022
6. Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Skala 1:50.000, KLHK 2022
7. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial Revisi VII Skala 1:250.000, KLHK 2022
8. Peta Gambut Skala 1:250.000, KSP 2017
9. Peta Hak Guna Usaha Skala 1:250.000, KSP 2022
10. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000, BIG 2023
11. Peta Batas Administrasi Skala 1:50.000, KSP 2023

Catatan :

1. Jika terdapat perbedaan batas wilayah administrasi maka merujuk pada batas wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Luas dihitung secara digital menggunakan sistem proyeksi Cylindrical Equal Area.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024



PETA RENCANA KERJA SUB NASIONAL ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE (FOLU) NET SINK* 2030

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LUAS : ± 770.041 Ha

SKALA 1:500.000

0 12.5 25 50 75 100 Km

0 2.5 5 10 15 20 Cm

U

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Koordinat : Sistem Geografis
Datum : WGS 1984 / SRGI

Lampiran I. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : 446 Tahun 2024
Tanggal : 23 Januari 2024

a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI
- Ibukota Provinsi
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Garis Pantai

PERHUBUNGAN
- Jalan

PERAIRAN
- Sungai
- Danau / Waduk

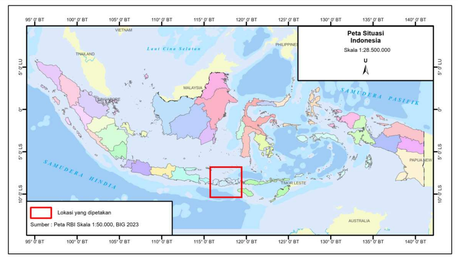
ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FOLU NET SINK* 2030
- RO1 (Pencegahan Deforestasi Mineral)
- RO2 (Pencegahan Deforestasi Gambut)
- RO3 (Pencegahan Degradasi Konsesi)
- RO4 (Pembangunan Hutan Tanaman)
- RO5 (Penerapan Pengayaan Hutan Alam)
- RO6 (Penerapan RIL-C)
- RO7 (Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi)
- RO8 (Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi)
- RO9 (Pengelolaan Tata Air Gambut)
- RO10 (Pelaksanaan Restorasi Gambut)
- RO11 (Perlindungan Areal Konservasi Tinggi)
- RO12 (Pengelolaan Mangrove)

Dasar:
1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional.
2. Keputusan MenteriLHK Nomor 168/MENLHK/PKTLPLA.1/2/2022 Tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink* 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Sumber:
1. Peta Indeks Jasa Lingkungan, Indeks Prioritas Lokasi, Indeks Kelembagaan Skala 1:250.000, KLHK 2022
2. Peta Penutupan Lahan Skala 1:250.000, KLHK 1990 & 2022
3. Peta Kawasan Hutan Skala 1:250.000, KLHK 2022
4. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Skala 1:250.000, KLHK 2022
5. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Skala 1:250.000, KLHK 2022
6. Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Skala 1:50.000, KLHK 2022
7. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial Revisi VII Skala 1:250.000, KLHK 2022
8. Peta Gambut Skala 1:250.000, KSP 2017
9. Peta Hak Guna Usaha Skala 1:250.000, KSP 2022
10. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000, BIG 2023
11. Peta Batas Administrasi Skala 1:50.000, KSP 2023

Catatan :

1. Jika terdapat perbedaan batas wilayah administrasi maka merujuk pada batas wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Luas dihitung secara digital menggunakan sistem proyeksi Cylindrical Equal Area



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

PETA RENCANA KERJA SUB NASIONAL ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE (FOLU) NET SINK* 2030

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LUAS : ± 1.203.468 Ha

SKALA 1:900.000

0 22.5 45 90 135 180 Km

0 2.5 5 10 15 20 Cm

U

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Koordinat : Sistem Geografis
Datum : WGS 1984 / SRGI

Lampiran I. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : 446 Tahun 2024
Tanggal : 23 Januari 2024

a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI
- Ibukota Provinsi
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Garis Pantai

PERHUBUNGAN
- Jalan

PERAIRAN
- Sungai
- Danau / Waduk

ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FOLU NET SINK* 2030

- RO1 (Pencegahan Deforestasi Mineral)
- RO2 (Pencegahan Deforestasi Gambut)
- RO3 (Pencegahan Degradasi Konsesi)
- RO4 (Pembangunan Hutan Tanaman)
- RO5 (Penerapan Pengayaan Hutan Alam)
- RO6 (Penerapan RIL-C)
- RO7 (Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi)
- RO8 (Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi)
- RO9 (Pengelolaan Tata Air Gambut)
- RO10 (Pelaksanaan Restorasi Gambut)
- RO11 (Perlindungan Areal Konservasi Tinggi)
- RO12 (Pengelolaan Mangrove)

Dasar:

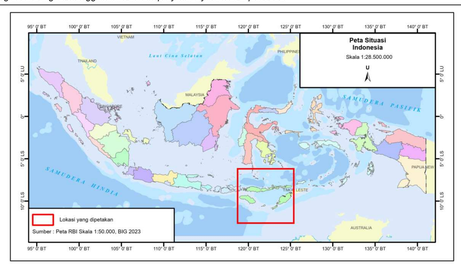
1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional.
2. Keputusan MenteriLHK Nomor 168/MENLHK/PKTLPLA.1/2/2022 Tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink* 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Sumber:

1. Peta Indeks Jasa Lingkungan, Indeks Prioritas Lokasi, Indeks Kelembagaan Skala 1:250.000, KLHK 2022
2. Peta Penutupan Lahan Skala 1:250.000, KLHK 1990 & 2022
3. Peta Kawasan Hutan Skala 1:250.000, KLHK 2022
4. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Skala 1:250.000, KLHK 2022
5. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Skala 1:250.000, KLHK 2022
6. Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Skala 1:50.000, KLHK 2022
7. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial Revisi VII Skala 1:250.000, KLHK 2022
8. Peta Gambut Skala 1:250.000, KSP 2017
9. Peta Hak Guna Usaha Skala 1:250.000, KSP 2022
10. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000, BIG 2023
11. Peta Batas Administrasi Skala 1:50.000, KSP 2023

Catatan :

1. Jika terdapat perbedaan batas wilayah administrasi maka merujuk pada batas wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Luas dihitung secara digital menggunakan sistem proyeksi Cylindrical Equal Area.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

PETA RENCANA KERJA SUB NASIONAL ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE (FOLU) NET SINK* 2030

PROVINSI PAPUA BARAT

LUAS : ± 7.715.254 Ha

SKALA 1:550.000

0 13.75 27.5 55 82.5 110 Km

0 2.5 5 10 15 20 Cm

U

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Koordinat : Sistem Geografis
Datum : WGS 1984 / SRGI

Lampiran I. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : 446 Tahun 2024
Tanggal : 23 Januari 2024

a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI
- Ibukota Provinsi
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Garis Pantai

PERHUBUNGAN
- Jalan

PERAIRAN
- Sungai
- Danau / Waduk

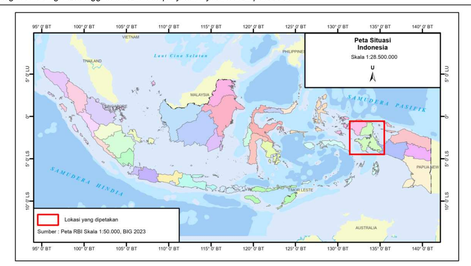
ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FOLU NET SINK* 2030
- RO1 (Pencegahan Deforestasi Mineral)
- RO2 (Pencegahan Deforestasi Gambut)
- RO3 (Pencegahan Degradasi Konsesi)
- RO4 (Pembangunan Hutan Tanaman)
- RO5 (Penerapan Pengayaan Hutan Alam)
- RO6 (Penerapan RIL-C)
- RO7 (Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi)
- RO8 (Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi)
- RO9 (Pengelolaan Tata Air Gambut)
- RO10 (Pelaksanaan Restorasi Gambut)
- RO11 (Perlindungan Areal Konservasi Tinggi)
- RO12 (Pengelolaan Mangrove)

Dasar:
1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional.
2. Keputusan MenteriLHK Nomor 168/MENLHK/PKTLPLA.1/2/2022 Tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink* 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Sumber:
1. Peta Indeks Jasa Lingkungan, Indeks Prioritas Lokasi, Indeks Kelembagaan Skala 1:250.000, KLHK 2022
2. Peta Penutupan Lahan Skala 1:250.000, KLHK 1990 & 2022
3. Peta Kawasan Hutan Skala 1:250.000, KLHK 2022
4. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Skala 1:250.000, KLHK 2022
5. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Skala 1:250.000, KLHK 2022
6. Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Skala 1:50.000, KLHK 2022
7. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial Revisi VII Skala 1:250.000, KLHK 2022
8. Peta Gambut Skala 1:250.000, KSP 2017
9. Peta Hak Guna Usaha Skala 1:250.000, KSP 2022
10. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000, BIG 2023
11. Peta Batas Administrasi Skala 1:50.000, KSP 2023

Catatan :

1. Jika terdapat perbedaan batas wilayah administrasi maka merujuk pada batas wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Luas dihitung secara digital menggunakan sistem proyeksi Cylindrical Equal Area



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

PETA RENCANA KERJA SUB NASIONAL ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE (FOLU) NET SINK* 2030

PROVINSI PAPUA

LUAS : ± 5.308.372 Ha

SKALA 1:950.000

0 23.75 47.5 95 142.5 190 Km

0 2.5 5 10 15 20 Cm

U

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Koordinat : Sistem Geografis
Datum : WGS 1984 / SRGI

Lampiran I. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : 446 Tahun 2024
Tanggal : 23 Januari 2024

a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI
- Ibukota Provinsi
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Garis Pantai

PERHUBUNGAN
- Jalan

PERAIRAN
- Sungai
- Danau / Waduk

ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FOLU NET SINK* 2030

- RO1 (Pencegahan Deforestasi Mineral)
- RO2 (Pencegahan Deforestasi Gambut)
- RO3 (Pencegahan Degradasi Konsesi)
- RO4 (Pembangunan Hutan Tanaman)
- RO5 (Penerapan Pengayaan Hutan Alam)
- RO6 (Penerapan RIL-C)
- RO7 (Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi)
- RO8 (Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi)
- RO9 (Pengelolaan Tata Air Gambut)
- RO10 (Pelaksanaan Restorasi Gambut)
- RO11 (Perlindungan Areal Konservasi Tinggi)
- RO12 (Pengelolaan Mangrove)

Dasar:

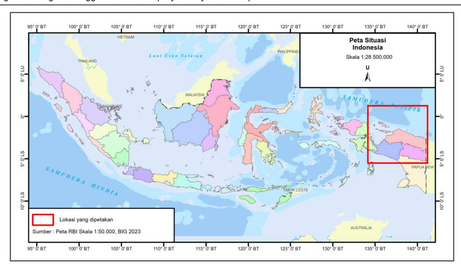
1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional.
2. Keputusan MenteriLHK Nomor 168/MENLHK/PKTLPLA.1/2/2022 Tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink* 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Sumber:

1. Peta Indeks Jasa Lingkungan, Indeks Prioritas Lokasi, Indeks Kelembagaan Skala 1:250.000, KLHK 2022
2. Peta Penutupan Lahan Skala 1:250.000, KLHK 1990 & 2022
3. Peta Kawasan Hutan Skala 1:250.000, KLHK 2022
4. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Skala 1:250.000, KLHK 2022
5. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Skala 1:250.000, KLHK 2022
6. Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Skala 1:50.000, KLHK 2022
7. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial Revisi VII Skala 1:250.000, KLHK 2022
8. Peta Gambut Skala 1:250.000, KSP 2017
9. Peta Hak Guna Usaha Skala 1:250.000, KSP 2022
10. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000, BIG 2023
11. Peta Batas Administrasi Skala 1:50.000, KSP 2023

Catatan :

1. Jika terdapat perbedaan batas wilayah administrasi maka merujuk pada batas wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Luas dihitung secara digital menggunakan sistem proyeksi Cylindrical Equal Area.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

PETA RENCANA KERJA SUB NASIONAL ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE (FOLU) NET SINK* 2030

PROVINSI RIAU

LUAS : ± 5.707.664 Ha

SKALA 1:600.000

0 15 30 60 90 120 Km

0 2.5 5 10 15 20 Cm

U

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Koordinat : Sistem Geografis
Datum : WGS 1984 / SRGI

Lampiran I. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : 446 Tahun 2024
Tanggal : 23 Januari 2024

a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI
- Ibukota Provinsi
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Garis Pantai

PERHUBUNGAN
- Jalan

PERAIRAN
- Sungai
- Danau / Waduk

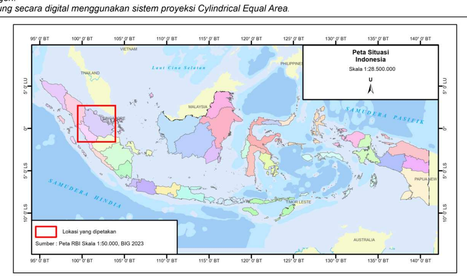
ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FOLU NET SINK* 2030
- RO1 (Pencegahan Deforestasi Mineral)
- RO2 (Pencegahan Deforestasi Gambut)
- RO3 (Pencegahan Degradasi Konsesi)
- RO4 (Pembangunan Hutan Tanaman)
- RO5 (Penerapan Pengayaan Hutan Alam)
- RO6 (Penerapan RIL-C)
- RO7 (Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi)
- RO8 (Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi)
- RO9 (Pengelolaan Tata Air Gambut)
- RO10 (Pelaksanaan Restorasi Gambut)
- RO11 (Perlindungan Areal Konservasi Tinggi)
- RO12 (Pengelolaan Mangrove)

Dasar:
1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional.
2. Keputusan MenteriLHK Nomor 168/MENLHK/PKTLPLA.1/2/2022 Tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink* 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

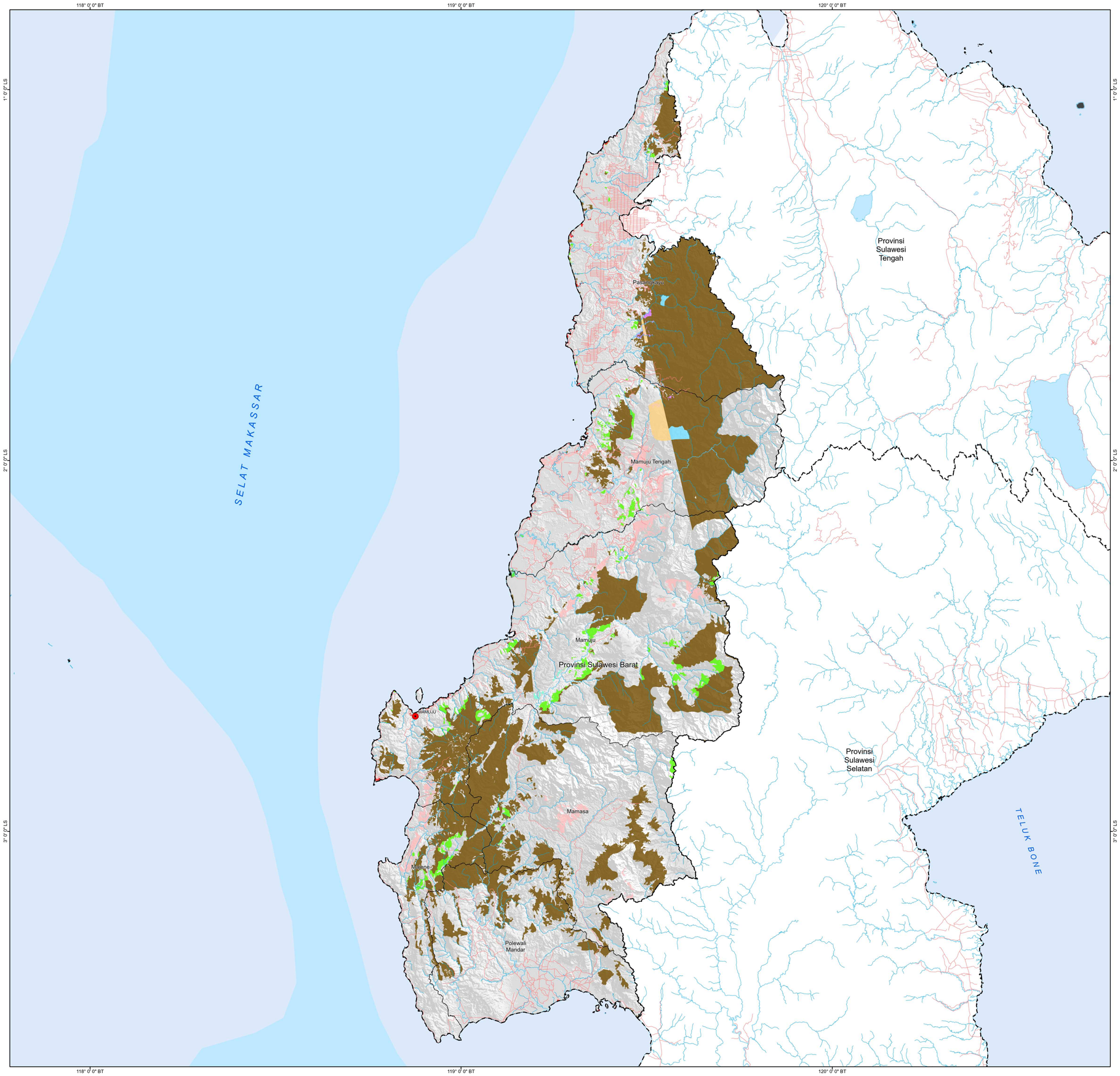
Sumber:
1. Peta Indeks Jasa Lingkungan, Indeks Prioritas Lokasi, Indeks Kelembagaan Skala 1:250.000, KLHK 2022
2. Peta Penutupan Lahan Skala 1:250.000, KLHK 1990 & 2022
3. Peta Kawasan Hutan Skala 1:250.000, KLHK 2022
4. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Skala 1:250.000, KLHK 2022
5. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Skala 1:250.000, KLHK 2022
6. Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Skala 1:50.000, KLHK 2022
7. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial Revisi VII Skala 1:250.000, KLHK 2022
8. Peta Gambut Skala 1:250.000, KSP 2017
9. Peta Hak Guna Usaha Skala 1:250.000, KSP 2022
10. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000, BIG 2023
11. Peta Batas Administrasi Skala 1:50.000, KSP 2023

Catatan :

1. Jika terdapat perbedaan batas wilayah administrasi maka merujuk pada batas wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Luas dihitung secara digital menggunakan sistem proyeksi Cylindrical Equal Area.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024



PETA RENCANA KERJA SUB NASIONAL ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE (FOLU) NET SINK* 2030

PROVINSI SULAWESI BARAT

LUAS : ± 551.637 Ha

SKALA 1:400.000

0 10 20 40 60 80 Km

0 2.5 5 10 15 20 Cm

U

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Koordinat : Sistem Geografis
Datum : WGS 1984 / SRGI

Lampiran I. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : 446 Tahun 2024
Tanggal : 23 Januari 2024

a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI
- Ibukota Provinsi
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Garis Pantai

PERHUBUNGAN
- Jalan

PERAIRAN
- Sungai
- Danau / Waduk

ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FOLU NET SINK* 2030
- RO1 (Pencegahan Deforestasi Mineral)
- RO2 (Pencegahan Deforestasi Gambut)
- RO3 (Pencegahan Degradasi Konsesi)
- RO4 (Pembangunan Hutan Tanaman)
- RO5 (Penerapan Pengayaan Hutan Alam)
- RO6 (Penerapan RIL-C)
- RO7 (Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi)
- RO8 (Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi)
- RO9 (Pengelolaan Tata Air Gambut)
- RO10 (Pelaksanaan Restorasi Gambut)
- RO11 (Perlindungan Areal Konservasi Tinggi)
- RO12 (Pengelolaan Mangrove)

Dasar:

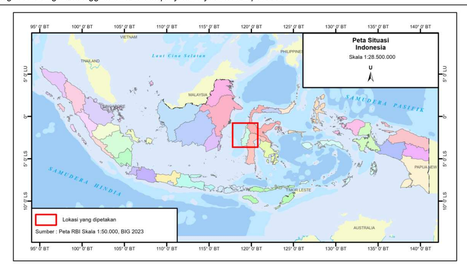
1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional.
2. Keputusan MenteriLHK Nomor 168/MENLHK/PKTLPLA.1/2/2022 Tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink* 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Sumber:

1. Peta Indeks Jasa Lingkungan, Indeks Prioritas Lokasi, Indeks Kelembagaan Skala 1:250.000, KLHK 2022
2. Peta Penutupan Lahan Skala 1:250.000, KLHK 1990 & 2022
3. Peta Kawasan Hutan Skala 1:250.000, KLHK 2022
4. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Skala 1:250.000, KLHK 2022
5. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Skala 1:250.000, KLHK 2022
6. Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Skala 1:50.000, KLHK 2022
7. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial Revisi VII Skala 1:250.000, KLHK 2022
8. Peta Gambut Skala 1:250.000, KSP 2017
9. Peta Hak Guna Usaha Skala 1:250.000, KSP 2022
10. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000, BIG 2023
11. Peta Batas Administrasi Skala 1:50.000, KSP 2023

Catatan :

1. Jika terdapat perbedaan batas wilayah administrasi maka merujuk pada batas wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Luas dihitung secara digital menggunakan sistem proyeksi Cylindrical Equal Area.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

PETA RENCANA KERJA SUB NASIONAL ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE (FOLU) NET SINK* 2030

PROVINSI SULAWESI SELATAN

LUAS : ± 1.301.323 Ha

SKALA 1:550.000

0 13.75 27.5 55 82.5 110 Km

0 2.5 5 10 15 20 Cm

U

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Koordinat : Sistem Geografis
Datum : WGS 1984 / SRGI

Lampiran I. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : 446 Tahun 2024
Tanggal : 23 Januari 2024

a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI
- Ibukota Provinsi
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Garis Pantai

PERHUBUNGAN
- Jalan

PERAIRAN
- Sungai
- Danau / Waduk

ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FOLU NET SINK* 2030
- RO1 (Pencegahan Deforestasi Mineral)
- RO2 (Pencegahan Deforestasi Gambut)
- RO3 (Pencegahan Degradasi Konsesi)
- RO4 (Pembangunan Hutan Tanaman)
- RO5 (Penerapan Pengayaan Hutan Alam)
- RO6 (Penerapan RIL-C)
- RO7 (Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi)
- RO8 (Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi)
- RO9 (Pengelolaan Tata Air Gambut)
- RO10 (Pelaksanaan Restorasi Gambut)
- RO11 (Perlindungan Areal Konservasi Tinggi)
- RO12 (Pengelolaan Mangrove)

Dasar:

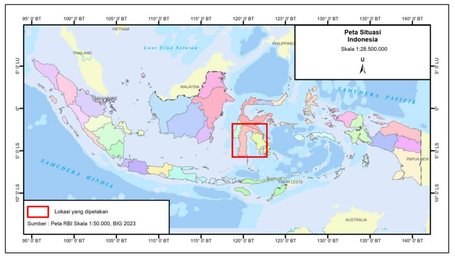
1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional.
2. Keputusan MenteriLHK Nomor 168/MENLHK/PKTLPLA.1/2/2022 Tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink* 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Sumber:

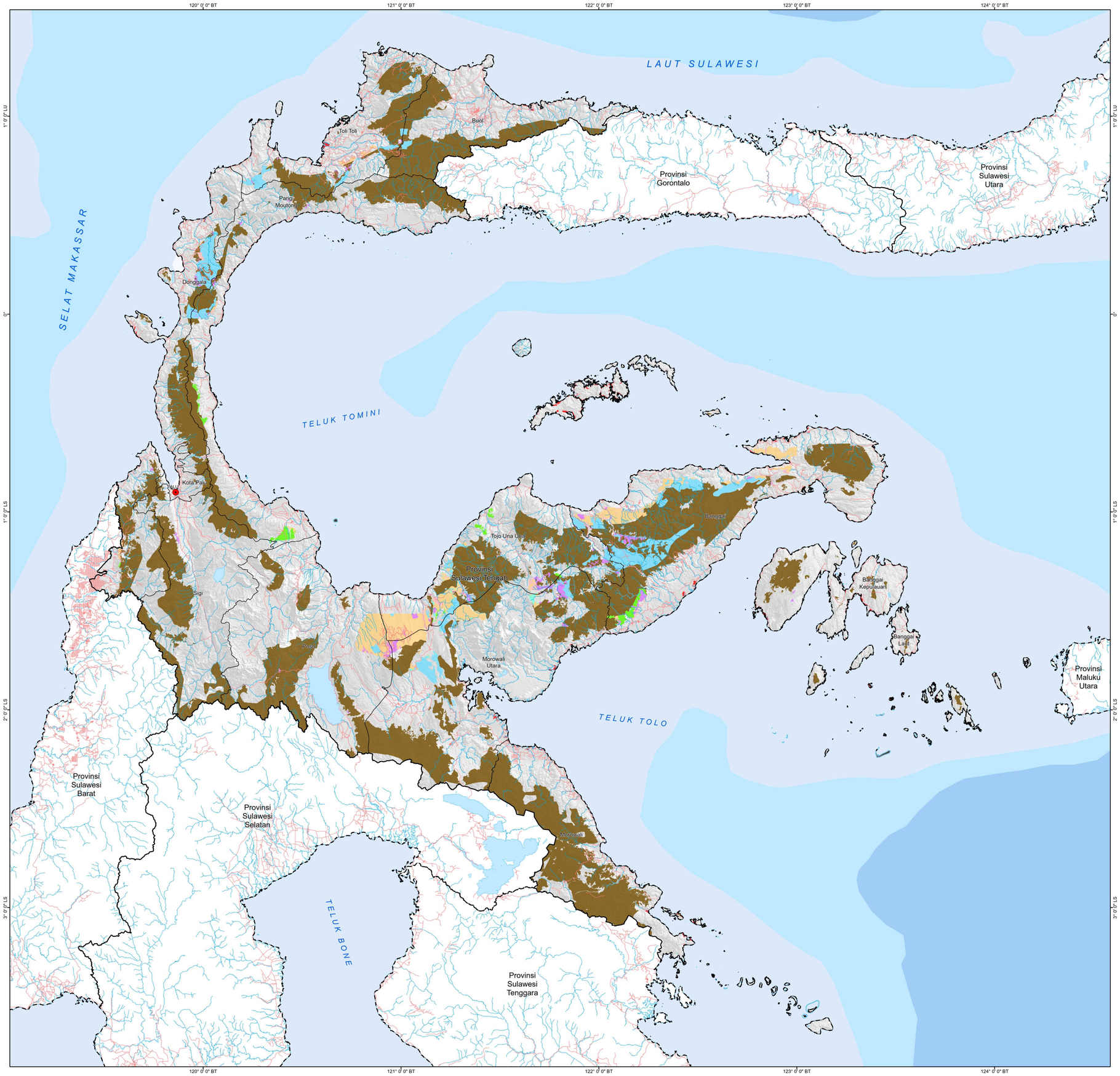
1. Peta Indeks Jasa Lingkungan, Indeks Prioritas Lokasi, Indeks Kelembagaan Skala 1:250.000, KLHK 2022
2. Peta Penutupan Lahan Skala 1:250.000, KLHK 1990 & 2022
3. Peta Kawasan Hutan Skala 1:250.000, KLHK 2022
4. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Skala 1:250.000, KLHK 2022
5. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Skala 1:250.000, KLHK 2022
6. Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Skala 1:50.000, KLHK 2022
7. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial Revisi VII Skala 1:250.000, KLHK 2022
8. Peta Gambut Skala 1:250.000, KSP 2017
9. Peta Hak Guna Usaha Skala 1:250.000, KSP 2022
10. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000, BIG 2023
11. Peta Batas Administrasi Skala 1:50.000, KSP 2023

Catatan :

1. Jika terdapat perbedaan batas wilayah administrasi maka merujuk pada batas wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Luas dihitung secara digital menggunakan sistem proyeksi Cylindrical Equal Area.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024



PETA RENCANA KERJA SUB NASIONAL ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE (FOLU) NET SINK* 2030

PROVINSI SULAWESI TENGAH

LUAS : ± 2.522.458 Ha

SKALA 1:750.000

0 18.75 37.5 75 112.5 150 Km

0 2.5 5 10 15 20 Cm

U

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Koordinat : Sistem Geografis
Datum : WGS 1984 / SRGI

Lampiran I. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : 446 Tahun 2024
Tanggal : 23 Januari 2024

a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI
- Ibukota Provinsi
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Garis Pantai

PERHUBUNGAN
- Jalan

PERAIRAN
- Sungai
- Danau / Waduk

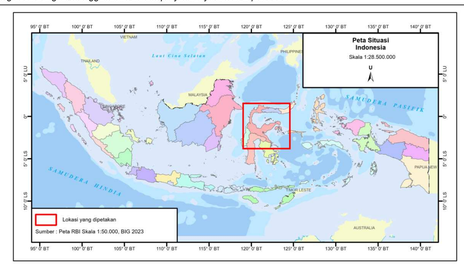
ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FOLU NET SINK* 2030
- RO1 (Pencegahan Deforestasi Mineral)
- RO2 (Pencegahan Deforestasi Gambut)
- RO3 (Pencegahan Degradasi Konsesi)
- RO4 (Pembangunan Hutan Tanaman)
- RO5 (Penerapan Pengayaan Hutan Alam)
- RO6 (Penerapan RIL-C)
- RO7 (Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi)
- RO8 (Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi)
- RO9 (Pengelolaan Tata Air Gambut)
- RO10 (Pelaksanaan Restorasi Gambut)
- RO11 (Perlindungan Areal Konservasi Tinggi)
- RO12 (Pengelolaan Mangrove)

Dasar:
1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional.
2. Keputusan MenteriLHK Nomor 168/MENLHK/PKTLPLA.1/2/2022 Tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink* 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

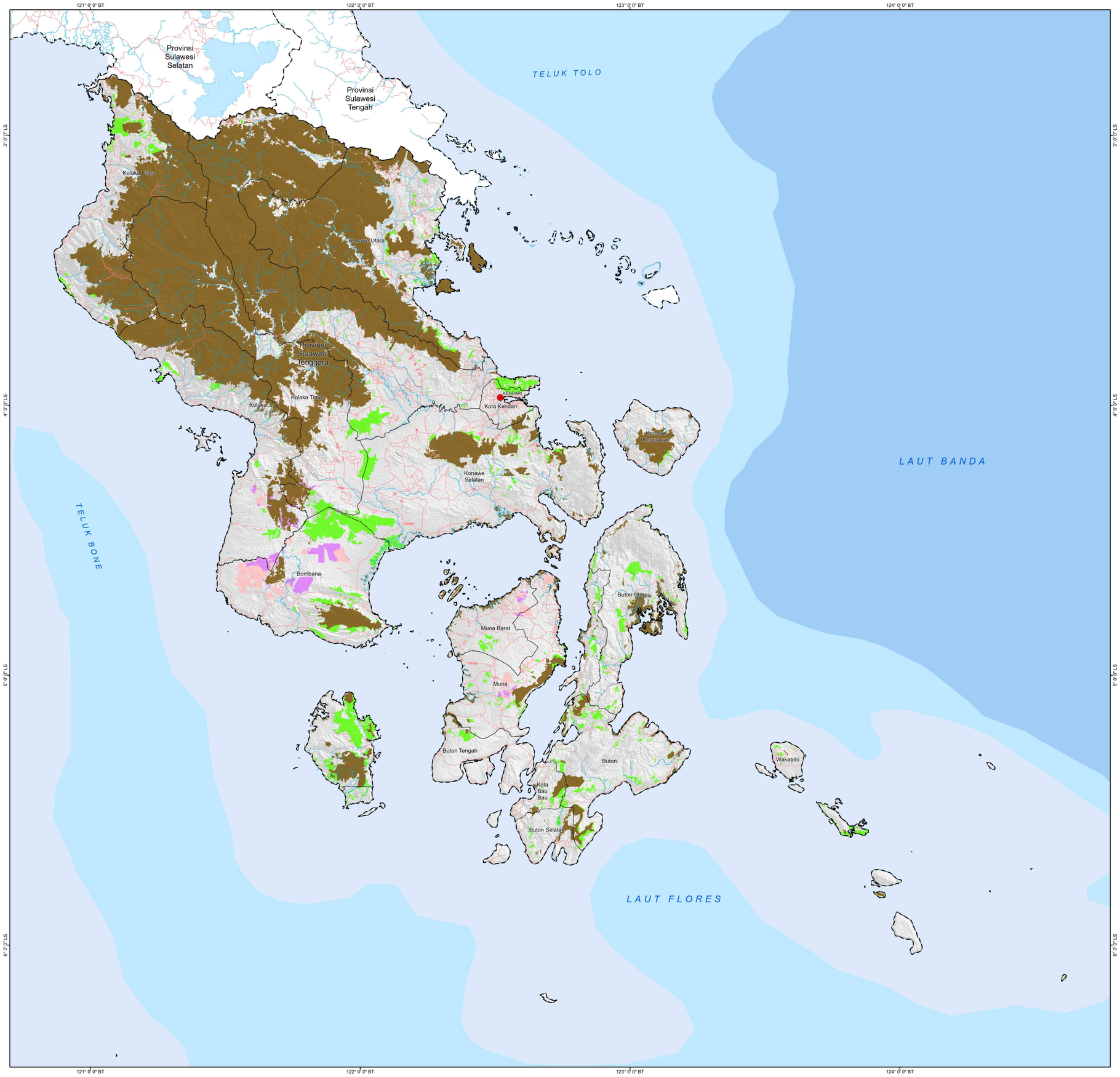
Sumber:
1. Peta Indeks Jasa Lingkungan, Indeks Prioritas Lokasi, Indeks Kelembagaan Skala 1:250.000, KLHK 2022
2. Peta Penutupan Lahan Skala 1:250.000, KLHK 1990 & 2022
3. Peta Kawasan Hutan Skala 1:250.000, KLHK 2022
4. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Skala 1:250.000, KLHK 2022
5. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Skala 1:250.000, KLHK 2022
6. Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Skala 1:50.000, KLHK 2022
7. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial Revisi VII Skala 1:250.000, KLHK 2022
8. Peta Gambut Skala 1:250.000, KSP 2017
9. Peta Hak Guna Usaha Skala 1:250.000, KSP 2022
10. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000, BIG 2023
11. Peta Batas Administrasi Skala 1:50.000, KSP 2023

Catatan :

1. Jika terdapat perbedaan batas wilayah administrasi maka merujuk pada batas wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Luas dihitung secara digital menggunakan sistem proyeksi Cylindrical Equal Area.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024



PETA RENCANA KERJA SUB NASIONAL ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE (FOLU) NET SINK* 2030

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LUAS : ± 1.512.007 Ha

SKALA 1:550.000

0 13.75 27.5 55 82.5 110 Km

0 2.5 5 10 15 20 Cm

U

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Koordinat : Sistem Geografis
Datum : WGS 1984 / SRGI

Lampiran I. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : 446 Tahun 2024
Tanggal : 23 Januari 2024

a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI
- Ibukota Provinsi
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Garis Pantai

PERHUBUNGAN
- Jalan

PERAIRAN
- Sungai
- Danau / Waduk

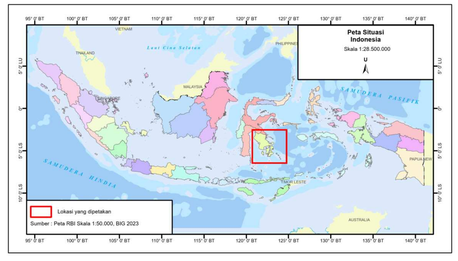
ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FOLU NET SINK* 2030
- RO1 (Pencegahan Deforestasi Mineral)
- RO2 (Pencegahan Deforestasi Gambut)
- RO3 (Pencegahan Degradasi Konsesi)
- RO4 (Pembangunan Hutan Tanaman)
- RO5 (Penerapan Pengayaan Hutan Alam)
- RO6 (Penerapan RIL-C)
- RO7 (Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi)
- RO8 (Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi)
- RO9 (Pengelolaan Tata Air Gambut)
- RO10 (Pelaksanaan Restorasi Gambut)
- RO11 (Perlindungan Areal Konservasi Tinggi)
- RO12 (Pengelolaan Mangrove)

Dasar:
1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional.
2. Keputusan MenteriLHK Nomor 168/MENLHK/PKTLPLA.1/2/2022 Tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink* 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

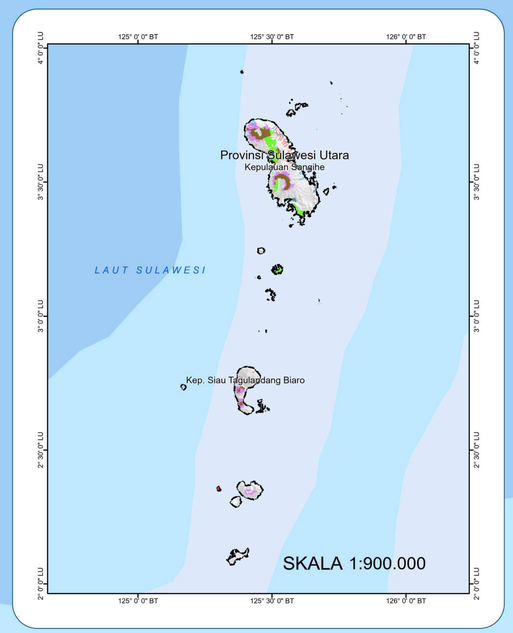
Sumber:
1. Peta Indeks Jasa Lingkungan, Indeks Prioritas Lokasi, Indeks Kelembagaan Skala 1:250.000, KLHK 2022
2. Peta Penutupan Lahan Skala 1:250.000, KLHK 1990 & 2022
3. Peta Kawasan Hutan Skala 1:250.000, KLHK 2022
4. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Skala 1:250.000, KLHK 2022
5. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Skala 1:250.000, KLHK 2022
6. Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Skala 1:50.000, KLHK 2022
7. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial Revisi VII Skala 1:250.000, KLHK 2022
8. Peta Gambut Skala 1:250.000, KSP 2017
9. Peta Hak Guna Usaha Skala 1:250.000, KSP 2022
10. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000, BIG 2023
11. Peta Batas Administrasi Skala 1:50.000, KSP 2023

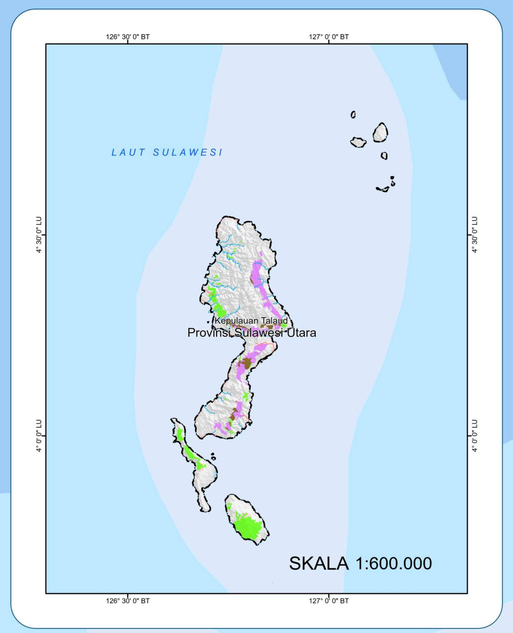
Catatan :

1. Jika terdapat perbedaan batas wilayah administrasi maka merujuk pada batas wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Luas dihitung secara digital menggunakan sistem proyeksi Cylindrical Equal Area



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024





PETA RENCANA KERJA SUB NASIONAL ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE (FOLU) NET SINK* 2030

PROVINSI SULAWESI UTARA

LUAS : ± 248.876 Ha

SKALA 1:300.000

0 7.5 15 30 45 60 Km

0 2.5 5 10 15 20 Cm

U

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Koordinat : Sistem Geografis
Datum : WGS 1984 / SRGI

Lampiran I. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : 446 Tahun 2024
Tanggal : 23 Januari 2024

a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI
- Ibukota Provinsi
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Garis Pantai

PERHUBUNGAN
- Jalan

PERAIRAN
- Sungai
- Danau / Waduk

ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FOLU NET SINK* 2030

- RO1 (Pencegahan Deforestasi Mineral)
- RO2 (Pencegahan Deforestasi Gambut)
- RO3 (Pencegahan Degradasi Konsesi)
- RO4 (Pembangunan Hutan Tanaman)
- RO5 (Penerapan Pengayaan Hutan Alam)
- RO6 (Penerapan RIL-C)
- RO7 (Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi)
- RO8 (Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi)
- RO9 (Pengelolaan Tata Air Gambut)
- RO10 (Pelaksanaan Restorasi Gambut)
- RO11 (Perlindungan Areal Konservasi Tinggi)
- RO12 (Pengelolaan Mangrove)

Dasar:

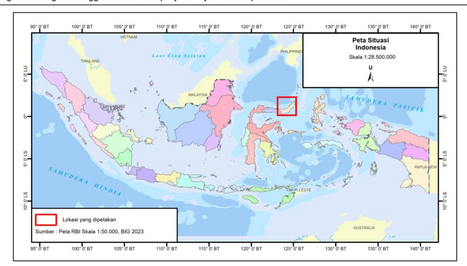
1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional.
2. Keputusan MenteriLHK Nomor 168/MENLHK/PKTLPLA.1/2/2022 Tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink* 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Sumber:

1. Peta Indeks Jasa Lingkungan, Indeks Prioritas Lokasi, Indeks Kelembagaan Skala 1:250.000, KLHK 2022
2. Peta Penutupan Lahan Skala 1:250.000, KLHK 1990 & 2022
3. Peta Kawasan Hutan Skala 1:250.000, KLHK 2022
4. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Skala 1:250.000, KLHK 2022
5. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Skala 1:250.000, KLHK 2022
6. Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Skala 1:50.000, KLHK 2022
7. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial Revisi VII Skala 1:250.000, KLHK 2022
8. Peta Gambut Skala 1:250.000, KSP 2017
9. Peta Hak Guna Usaha Skala 1:250.000, KSP 2022
10. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000, BIG 2023
11. Peta Batas Administrasi Skala 1:50.000, KSP 2023

Catatan :

1. Jika terdapat perbedaan batas wilayah administrasi maka merujuk pada batas wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Luas dihitung secara digital menggunakan sistem proyeksi Cylindrical Equal Area



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

PETA RENCANA KERJA SUB NASIONAL ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE (FOLU) NET SINK* 2030

PROVINSI SUMATERA BARAT

LUAS : ± 1.044.127 Ha

SKALA 1:650.000

0 16.25 32.5 65 97.5 130 Km

0 2.5 5 10 15 20 Cm

U

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Koordinat : Sistem Geografis
Datum : WGS 1984 / SRGI

Lampiran I. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : 446 Tahun 2024
Tanggal : 23 Januari 2024

a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI
- Ibukota Provinsi
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Garis Pantai

PERHUBUNGAN
- Jalan

PERAIRAN
- Sungai
- Danau / Waduk

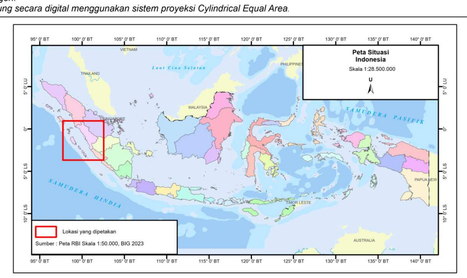
ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FOLU NET SINK* 2030
- RO1 (Pencegahan Deforestasi Mineral)
- RO2 (Pencegahan Deforestasi Gambut)
- RO3 (Pencegahan Degradasi Konsesi)
- RO4 (Pembangunan Hutan Tanaman)
- RO5 (Penerapan Pengayaan Hutan Alam)
- RO6 (Penerapan RIL-C)
- RO7 (Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi)
- RO8 (Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi)
- RO9 (Pengelolaan Tata Air Gambut)
- RO10 (Pelaksanaan Restorasi Gambut)
- RO11 (Perlindungan Areal Konservasi Tinggi)
- RO12 (Pengelolaan Mangrove)

Dasar:
1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional.
2. Keputusan MenteriLHK Nomor 168/MENLHK/PKTLPLA.1/2/2022 Tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink* 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Sumber:
1. Peta Indeks Jasa Lingkungan, Indeks Prioritas Lokasi, Indeks Kelembagaan Skala 1:250.000, KLHK 2022
2. Peta Penutupan Lahan Skala 1:250.000, KLHK 1990 & 2022
3. Peta Kawasan Hutan Skala 1:250.000, KLHK 2022
4. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Skala 1:250.000, KLHK 2022
5. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Skala 1:250.000, KLHK 2022
6. Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Skala 1:50.000, KLHK 2022
7. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial Revisi VII Skala 1:250.000, KLHK 2022
8. Peta Gambut Skala 1:250.000, KSP 2017
9. Peta Hak Guna Usaha Skala 1:250.000, KSP 2022
10. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000, BIG 2023
11. Peta Batas Administrasi Skala 1:50.000, KSP 2023

Catatan :

1. Jika terdapat perbedaan batas wilayah administrasi maka merujuk pada batas wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Luas dihitung secara digital menggunakan sistem proyeksi Cylindrical Equal Area.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

PETA RENCANA KERJA SUB NASIONAL ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE (FOLU) NET SINK* 2030

PROVINSI SUMATERA SELATAN

LUAS : ± 2.423.069 Ha

SKALA 1:600.000

0 15 30 60 90 120 Km

0 2.5 5 10 15 20 Cm

U

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Koordinat : Sistem Geografis
Datum : WGS 1984 / SRGI

Lampiran I. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : 446 Tahun 2024
Tanggal : 23 Januari 2024

a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI
- Ibukota Provinsi
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Garis Pantai

PERHUBUNGAN
- Jalan

PERAIRAN
- Sungai
- Danau / Waduk

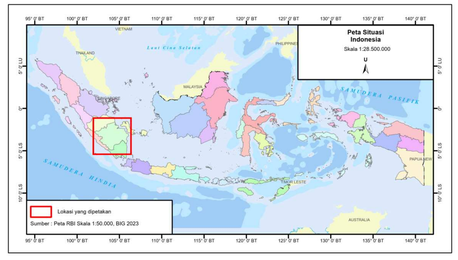
ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FOLU NET SINK* 2030
- RO1 (Pencegahan Deforestasi Mineral)
- RO2 (Pencegahan Deforestasi Gambut)
- RO3 (Pencegahan Degradasi Konsesi)
- RO4 (Pembangunan Hutan Tanaman)
- RO5 (Penerapan Pengayaan Hutan Alam)
- RO6 (Penerapan RIL-C)
- RO7 (Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi)
- RO8 (Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi)
- RO9 (Pengelolaan Tata Air Gambut)
- RO10 (Pelaksanaan Restorasi Gambut)
- RO11 (Perlindungan Areal Konservasi Tinggi)
- RO12 (Pengelolaan Mangrove)

Dasar:
1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional.
2. Keputusan MenteriLHK Nomor 168/MENLHK/PKTLPLA.1/2/2022 Tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink* 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Sumber:
1. Peta Indeks Jasa Lingkungan, Indeks Prioritas Lokasi, Indeks Kelembagaan Skala 1:250.000, KLHK 2022
2. Peta Penutupan Lahan Skala 1:250.000, KLHK 1990 & 2022
3. Peta Kawasan Hutan Skala 1:250.000, KLHK 2022
4. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Skala 1:250.000, KLHK 2022
5. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Skala 1:250.000, KLHK 2022
6. Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Skala 1:50.000, KLHK 2022
7. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial Revisi VII Skala 1:250.000, KLHK 2022
8. Peta Gambut Skala 1:250.000, KSP 2017
9. Peta Hak Guna Usaha Skala 1:250.000, KSP 2022
10. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000, BIG 2023
11. Peta Batas Administrasi Skala 1:50.000, KSP 2023

Catatan :

1. Jika terdapat perbedaan batas wilayah administrasi maka merujuk pada batas wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Luas dihitung secara digital menggunakan sistem proyeksi Cylindrical Equal Area.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

PETA RENCANA KERJA SUB NASIONAL ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE (FOLU) NET SINK* 2030

PROVINSI SUMATERA UTARA

LUAS : ± 1.486.281 Ha

SKALA 1:750.000

0 18.75 37.5 75 112.5 150 Km

0 2.5 5 10 15 20 Cm

U

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Koordinat : Sistem Geografis
Datum : WGS 1984 / SRGI

Lampiran I. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : 446 Tahun 2024
Tanggal : 23 Januari 2024

a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRASI
- Ibukota Provinsi
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Garis Pantai

PERHUBUNGAN
- Jalan

PERAIRAN
- Sungai
- Danau / Waduk

ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FOLU NET SINK* 2030
- RO1 (Pencegahan Deforestasi Mineral)
- RO2 (Pencegahan Deforestasi Gambut)
- RO3 (Pencegahan Degradasi Konsesi)
- RO4 (Pembangunan Hutan Tanaman)
- RO5 (Penerapan Pengayaan Hutan Alam)
- RO6 (Penerapan RIL-C)
- RO7 (Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi)
- RO8 (Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi)
- RO9 (Pengelolaan Tata Air Gambut)
- RO10 (Pelaksanaan Restorasi Gambut)
- RO11 (Perlindungan Areal Konservasi Tinggi)
- RO12 (Pengelolaan Mangrove)

Dasar:

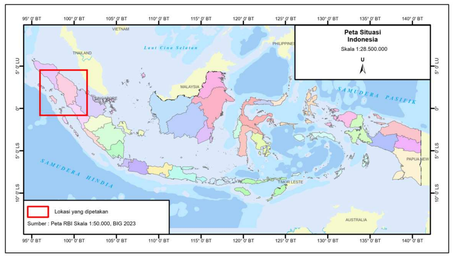
1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional.
2. Keputusan MenteriLHK Nomor 168/MENLHK/PKTLPLA.1/2/2022 Tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink* 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Sumber:

1. Peta Indeks Jasa Lingkungan, Indeks Prioritas Lokasi, Indeks Kelembagaan Skala 1:250.000, KLHK 2022
2. Peta Penutupan Lahan Skala 1:250.000, KLHK 1990 & 2022
3. Peta Kawasan Hutan Skala 1:250.000, KLHK 2022
4. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Skala 1:250.000, KLHK 2022
5. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Skala 1:250.000, KLHK 2022
6. Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Skala 1:50.000, KLHK 2022
7. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial Revisi VII Skala 1:250.000, KLHK 2022
8. Peta Gambut Skala 1:250.000, KSP 2017
9. Peta Hak Guna Usaha Skala 1:250.000, KSP 2022
10. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000, BIG 2023
11. Peta Batas Administrasi Skala 1:50.000, KSP 2023

Catatan :

1. Jika terdapat perbedaan batas wilayah administrasi maka merujuk pada batas wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Luas dihitung secara digital menggunakan sistem proyeksi Cylindrical Equal Area.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 446 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK RENCANA KERJA SUB NASIONAL ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE NET SINK* 2030

LUAS RENCANA KERJA SUB NASIONAL ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE NET SINK* 2030
PADA 28 (DUA PULUH DELAPAN) PROVINSI

No.	Provinsi	Luas (Ha)
1.	Aceh	2.221.051
2.	Bengkulu	364.167
3.	Jambi	1.093.828
4.	Kepulauan Bangka Belitung	359.927
5.	Kepulauan Riau	317.087
6.	Lampung	194.169
7.	Riau	5.707.664
8.	Sumatera Barat	1.044.127
9.	Sumatera Selatan	2.423.069
10.	Sumatera Utara	1.486.281
11.	Kalimantan Barat	7.653.423
12.	Kalimantan Selatan	1.457.042
13.	Kalimantan Tengah	12.483.536
14.	Kalimantan Timur	11.495.942
15.	Kalimantan Utara	2.777.516
16.	Gorontalo	472.940
17.	Sulawesi Barat	551.637
18.	Sulawesi Selatan	1.301.323
19.	Sulawesi Tengah	2.522.458
20.	Sulawesi Tenggara	1.512.007
21.	Sulawesi Utara	248.876
22.	Bali	114.529
23.	Nusa Tenggara Barat	770.041
24.	Nusa Tenggara Timur	1.203.468
25.	Maluku	2.385.275
26.	Maluku Utara	2.602.871
27.	Papua	5.308.372
28.	Papua Barat	7.715.254

Keterangan :
1. Luas dihitung secara digital menggunakan sistem proyeksi *Cylindrical Equal Area*;
2. Batas administrasi pemerintahan berdasarkan Peta Batas Administrasi Pemerintahan Tahun 2023 yang bersumber dari Portal Kebijakan Satu Peta (KSP).

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 446 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK RENCANA KERJA SUB NASIONAL ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE NET SINK* 2030

LUAS RENCANA KERJA SUB NASIONAL ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI *INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE NET SINK* 2030

No.	Arahan	Luas (Ha)
1.	Pencegahan Deforestasi Mineral (RO1)	8.219.473
2.	Pencegahan Deforestasi Gambut (RO2)	1.818.563
3.	Pencegahan Degradasi Konsesi (RO3)	3.331.126
4.	Pembangunan Hutan Tanaman (RO4)	1.026.870
5.	Penerapan Pengayaan Hutan Alam (RO5)	8.844.584
6.	Penerapan RIL-C (RO6)	8.236.015
7.	Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi (RO7)	7.638.001
8.	Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi (RO8)	3.524.677
9.	Pengelolaan Tata Air Gambut (RO9)	3.139.191
10.	Pelaksanaan Restorasi Gambut (RO10)	2.825.380
11.	Perlindungan Areal Konservasi Tinggi (RO11)	28.765.279
12.	Pengelolaan Mangrove (RO12)	1.564.551

Keterangan :
1. Luas dihitung secara digital menggunakan sistem proyeksi *Cylindrical Equal Area*;
2. Batas administrasi pemerintahan berdasarkan Peta Batas Administrasi Pemerintahan Tahun 2023 yang bersumber dari Portal Kebijakan Satu Peta (KSP).